

**PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN *GOOD*  
*CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *COST OF DEBT*:  
STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

Oleh :

Nama : Fatwa Naratama Romadani

No. Mahasiswa : 14312370

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2019**

**PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *COST OF DEBT*: STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama : Fatwa Naratama Romadani

No. Mahasiswa : 14312370

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2019**

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi dalam bentuk apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 14 Januari 2019

Penulis,



(Fatwa Naratama Romadani)

**PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *COST OF DEBT*: STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

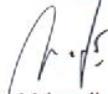
Nama : Fatwa Naratama Romadani

No. Mahasiswa : 14312370

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 11 Jan 2019

Dosen Pembimbing,



Ace utk diuji

(Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., Ak.)

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI**

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE  
TERHADAP COST OF DEBT: STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN DI INDONESIA**

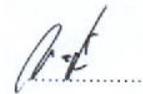
Disusun Oleh : **FATWA NARATAMA ROMADANI**

Nomor Mahasiswa : **14312370**

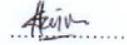
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Selasa, tanggal: 12 Februari 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Mahmudi, Dr., SE., M.Si, Ak, CMA.



Penguji : Ayu Chairina L., SE, M.App. Com. M.Res, Ph.D., Ak., CA.



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

## **KATA PENGANTAR**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hanya dengan pertolongan Allah SWT penulis dapat menyelesaikan karya ini, shalawat dan salam terlimpah kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW. Skripsi yang berjudul “**PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *COST OF DEBT*: STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN DI INDONESIA.**” Disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya keridhaan dari Allah SWT dan juga bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan, kesempatan, serta mengabulkan setiap doa hamba-Nya dalam menjalani segala aktifitas sebagai seorang muslim yang berjuang menuntut ilmu di jalan-Nya.
2. Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh manusia di muka bumi.

3. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., Ak., CMA. selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Beliau adalah inspirator terbaik dalam memotivasi penulis sehingga karya ini selesai dengan baik.
7. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi yang telah memberikan banyak wawasan, ilmu, dan pengalamannya.
8. Kedua orang tua tercinta dan keluarga besar di mana pun tempat tinggalnya, teriring doa yang paling tulus semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan memberikan kenikmatan dunia dan akhirat.
9. Sahabat-sahabatku tercinta dari “Our Jomblo” dan “Team Cozy”, Oki, Irfan, Alvan, Alpi, Febri, Abi, Zulfa, Deni, Adi, Hamam, Faisal, Imam, Hildan, Udin, Abdus, Musyan, Stefan, Yuli dan teman seperjuangan bimbingan skripsi Raga, Firman, Adnan terima kasih untuk persahabatan yang indah selama ini, kenangan bersama kalian akan selalu tersimpan dalam lubuk hati yang terdalam.
10. Teman-teman dari kelas OCB H. Semoga kita sukses selalu.

11. Anak-anak kost “Mas Andy” yang banyak kalau di sebutkan satu-satu. Terima kasih atas kebersamaannya.

12. Teman-teman KKN unit 23 dan warga Desa Giricahyo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi D.I. Yogyakarta. Terima kasih atas apa yang telah kalian berikan selama satu bulan menjalani masa KKN.

13. Teman-teman dari Jurusan Akuntansi angkatan 2014, semoga kita sukses selalu.

Semoga amal dan kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapatkan imbalan yang layak dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua. Amiin. Kritik dan saran masih diperlukan dan berharap dapat disampaikan untuk menyempurnakannya.

**Wassalamu’alaikum Wr.Wb.**

Penulis,

(Fatwa Naratama Romadani)

## **MOTTO**

“Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal.”

(Q.S At-Taubah : 129)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Q.S Ar-Ra'd :11)

“Tiada orang yang gagal selama kau tidak berhenti. Selama kau masih mau berusaha dan mencoba, maka keberhasilan adalah sebuah kemungkinan.”

(Positive Vibes)

“Happiness is only real when shared.”

(Christopher McCandless)

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta
2. Keluarga dan teman-teman tercinta
3. Agama, Nusa, dan Bangsa

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran.....	xii
Abstrak.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	10
1.5. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II.....	13
KAJIAN PUSTAKA.....	13
2.1. Landasan Teori.....	13
2.1.1 Teori Agensi ( <i>Agency Theory</i> ).....	13
2.1.2 Pajak.....	17
2.1.3 Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ).....	19
2.1.4 <i>Good Corporate Governance</i> .....	21
2.1.5 Kepemilikan Institusional.....	24
2.1.6 Kepemilikan Manajerial.....	25
2.1.7 Dewan Komisaris Independen.....	26
2.1.8 Komite Audit.....	28
2.1.9 Biaya Utang ( <i>Cost of Debt</i> ).....	29
2.2. Penelitian Terdahulu.....	32

2.3. Hipotesis Penelitian .....	35
2.3.1 Penghindaran Pajak dan <i>Cost of Debt</i> .....	35
2.3.2 Kepemilikan Institusional dan <i>Cost of Debt</i> .....	38
2.3.3 Kepemilikan Manajerial dan <i>Cost of Debt</i> .....	41
2.3.4 Dewan Komisaris Independen dan <i>Cost of Debt</i> .....	43
2.3.5 Komite Audit dan <i>Cost of Debt</i> .....	45
<b>BAB III .....</b>	<b>47</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
3.1. Pendekatan Penelitian .....	47
3.2. Populasi dan Sampel Penelitian .....	47
3.2.1 Populasi.....	48
3.2.2 Sampel.....	48
3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	49
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.5. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .....	50
3.5.1 Variabel Dependen.....	50
3.5.2 Variabel Independen.....	51
3.6. Teknik Analisis Data.....	54
3.6.1. Uji Statistik Deskriptif.....	54
3.6.2. Uji Asumsi Klasik.....	55
3.6.3. Analisis Regresi.....	59
3.6.4. Uji Hipotesis.....	61
<b>BAB IV .....</b>	<b>63</b>
<b>ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
4.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	63
4.2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	65
4.3. Hasil Uji Asumsi Klasik .....	67
4.3.1. Hasil Uji Normalitas.....	67
4.3.2. Hasil Uji Multikolinearitas.....	68
4.3.3. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	69

4.3.4. Hasil Uji Autokorelasi.....	70
4.4. Hasil Uji Persamaan Regresi Linier Berganda.....	71
4.5. Hasil Uji Hipotesis .....	74
4.5.1. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( <i>Adjusted R2</i> ).....	74
4.5.2. Hasil Uji Parsial (Uji t).....	75
4.6. Pembahasan Hasil Penelitian.....	77
4.6.1. Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap <i>Cost of Debt</i> .....	77
4.6.2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Cost of Debt</i> .....	79
4.6.3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap <i>Cost of Debt</i> .....	80
4.6.4. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap <i>Cost of Debt</i> .....	81
4.6.2. Pengaruh Komite Audit Terhadap <i>Cost of Debt</i> .....	82
BAB V .....	83
PENUTUP .....	83
5.1. Simpulan .....	83
5.2. Keterbatasan Penelitian.....	84
5.3. Implikasi Penelitian .....	85
5.4. Saran .....	85
DAFTAR PUSTAKA .....	86
LAMPIRAN.....	89

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 4.1 Pemilihan Sampel Penelitian.....	64
Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif.....	65
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas.....	67
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas.....	68
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson.....	71
Tabel 4.6 Hasil Uji Persamaan Regresi Linier Berganda.....	72
Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	74
Tabel 4.8 Hasil Uji Parsial (Uji t).....	75

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	70
---	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	Daftar Perusahaan Sampel
Lampiran 2	:	Data Sampel Penelitian
Lampiran 3	:	Output Hasil Pengujian Data

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penghindaran pajak dan *good corporate governance* terhadap *cost of debt* pada perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi bangunan yang berada di Indonesia serta terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2017. Sampel yang digunakan diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Dalam penelitian ini berjumlah 27 data perusahaan dengan periode pengamatan selama 3 tahun berturut-turut. Maka diperoleh 81 data yang dijadikan sebagai sampel. Regresi linier digunakan sebagai alat analisis pada penelitian ini. Hasil yang ditemukan pada penelitian ini menunjukkan penghindaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *cost of debt*. *Good corporate governance* yang di proksikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit berpengaruh negatif signifikan pada *cost of debt*. Tetapi GCG yang di proksi dewan komisaris independen berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *cost of debt*.

Kata kunci : biaya utang, penghindaran perpajakan, tata kelola perusahaan

## ABSTRACT

*This study aims to examine the effect of tax avoidance and good corporate governance on the cost of debt in property, real estate, and building construction companies located in Indonesia and listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015 until 2017. The samples used were obtained using the purposive method sampling. In this study there were 27 company data with observation periods for 3 consecutive years. Then obtained 81 data used as samples. Linear regression is used as an analytical tool in this study. The results found in this study show that tax avoidance has a significant positive effect on the cost of debt. Good corporate governance that is proxied by institutional ownership, managerial ownership, audit committees has a significant negative effect on the cost of debt. But GCG which is proxied by an independent board of commissioners has a negative and not significant effect on the cost of debt.*

*Keywords : cost of debt, tax avoidance, GCG*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara didukung dengan berkembangnya dunia bisnis. Setiap perusahaan membutuhkan tambahan dana dari pihak luar perusahaan guna kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Sebelum kegiatan operasional dalam suatu perusahaan ini dijalankan, pertama kali yang harus diperhatikan adalah sumber pendanaan (modal). Sumber pendanaan merupakan suatu hal yang sangat memberikan efek terbesar dalam setiap perusahaan dan dapat juga dikatakan bahwa modal merupakan nyawa dalam suatu perusahaan, tanpa adanya modal suatu perusahaan tidak dapat menjalankan kegiatan operasional dengan lancar.

Modal merupakan kontribusi pemilik pada suatu perusahaan sekaligus menunjukkan hak pemilik atas perusahaan tersebut. Modal dalam suatu perusahaan dapat bersumber dari pihak internal maupun eksternal perusahaan. Modal yang bersumber dari internal perusahaan merupakan kekayaan perusahaan yang berasal dari pemilik perusahaan atau dari hasil usaha perusahaan, sedangkan modal yang berasal dari eksternal perusahaan, yaitu kekayaan perusahaan yang diperoleh dari meminjam kepada pihak lain.

Perusahaan cenderung akan memilih sumber internal terlebih dahulu sebagai sumber pendanaan. Apabila sumber internal dirasa tidak cukup untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan, maka perusahaan akan menggunakan

sumber eksternal, yaitu dengan cara melakukan utang. Utang akan menimbulkan biaya utang (*cost of debt*). Biaya utang merupakan tingkat pengembalian yang diisyaratkan. Biaya utang dari suatu perusahaan ditentukan oleh karakteristik perusahaan penerbit utang karena mempengaruhi risiko kebangkrutan, *agency cost* dan masalah asimetri informasi (Bhojraj dan Sengupta, 2003).

Brealey (2009) dalam Saputro (2018) menyatakan bahwa suatu perusahaan akan meningkatkan utangnya jika penghematan pajak lebih besar daripada pengorbanannya. Penggunaan utang itu sendiri akan berhenti jika telah terjadi keseimbangan antara penghematan dan pengorbanan akibat dari penggunaan utang. Dalam memperoleh utang, perusahaan akan dikenakan biaya sehingga akan menimbulkan biaya utang (*cost of debt*). Biaya utang merupakan tingkat bunga yang dibayar perusahaan kepada pemberi pinjaman yaitu kreditor sebagai tingkat pengembalian yang disyaratkan.

Mardiasmo (2013) mengungkapkan *tax avoidance* adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang dan peraturan perpajakan. Menurut Desai dan Darmapala (2006) bahwa praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat memberikan efek substitusi terhadap pengguna utang. Sedangkan, menurut penelitian yang dilakukan Graham (2006) menyatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk memperkecil pajak seperti perlindungan pajak (*tax shelter*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan substitusi dari pengguna utang, sehingga dapat meningkatkan *financial slack* mengurangi biaya, risiko kebangkrutan, dan meningkatkan kualitas kredit, dampaknya akan mengurangi

biaya utang. Hal ini mendukung *trade-off theory* bahwa *tax avoidance* akan mengurangi *cost of debt*.

Masalah penghindaran pajak dalam sepuluh tahun terakhir mengemuka dan mendapatkan perhatian otoritas perpajakan internasional. Pemicunya krisis global tahun 2008. Krisis ini menyebabkan negara-negara kesulitan mencari sumber pendapatan. Satu-satunya cara yaitu dengan mendongkrak penerimaan perpajakan. Namun kendala yang dihadapi saat itu praktik perencanaan pajak (*tax planning*) oleh perusahaan multinasional sangat agresif sehingga perusahaan hanya membayar pajak sedikit saja (Suparman, 2017).

Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. *Tax avoidance* yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Mangoting, 1999).

Berdasarkan laporan yang dibuat bersama antara Ernesto Crivelly, penyidik dari IMF tahun 2016, berdasarkan survei, lalu dianalisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan *database International Center for Policy and Research (ICPR)*, dan *International Center for Taxation and Development (ICTD)* muncullah data penghindaran pajak perusahaan 30 negara.

Indonesia masuk peringkat ke 11 terbesar dalam hal pengelakan pajak dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar dolar AS, pajak perusahaan tidak dibayarkan

perusahaan yang ada di Indonesia ke Dinas Pajak Indonesia. Pengelakan pajak merupakan masalah serius di Indonesia. Diduga setiap tahun ada Rp110 triliun yang merupakan angka penghindaran pajak. Kebanyakan adalah badan usaha, sekitar 80 persen, sisanya adalah wajib pajak perorangan.

Secara hukum, *tax avoidance* tidak dilarang, namun sering mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi negatif dan menunjukkan perilaku ketidakpatuhan. Konotasi negatif ini akan membuat kreditor memandang praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan sebagai tindakan yang mengandung risiko. Masri dan Martani (2012) menyatakan bahwa pandangan kreditor ini antara lain disebabkan oleh pemerintah menerbitkan UU nomor 28 tahun 2007 (sekarang UU nomor 16 tahun 2009) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), melakukan reformasi perpajakan, dan meningkatkan pemberantasan korupsi. Pandangan ini membuat kreditor cenderung membebankan bunga yang lebih besar.

Biaya utang lebih tepat untuk menilai risiko dan manfaat dari pengindaran pajak karena bank biasanya menjadi hubungan jangka panjang dengan perusahaan peminjam dan memiliki akses ke informasi eksklusif perusahaan. Sehingga dapat dilihat terdapat hubungan antara penghindaran pajak dengan biaya utang pada perusahaan. Penelitian penghindaran pajak terhadap *cost of debt* pernah dilakukan oleh Masri dan Martani (2012), Rahmawati (2015), Shin dan Woo (2017). Hasilnya menunjukkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap *cost of debt*. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Erniawati (2014), Purwanti (2014) yang menunjukkan bahwa *tax avoidance* tidak berpengaruh

positif terhadap *cost of debt*. Selain itu, penelitian terbaru dilakukan oleh Zahro et al. (2018) yang menunjukkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap *cost of debt*.

Selain penghindaran pajak (*tax avoidance*) penelitian kali ini juga membahas mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* yang menggunakan empat proksi yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap *cost of debt*. Menurut Nugroho (2014), *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap biaya utang karena di dalam *corporate governance* terdapat aturan-aturan yang mempengaruhi hubungan antara para pemegang saham dan manajer. Dalam menentukan biaya diperlukan keputusan yang tepat yang diambil oleh seorang manajer untuk membuat kinerja perusahaan semakin membaik. Seperti yang dikatakan Rebecca (2012) penerapan *corporate governance* berarti dianggap mampu meningkatkan pengawasan terhadap manajemen untuk mendorong pengambilan keputusan yang efektif, mencegah tindakan oportunistik yang tidak sesuai dengan kepentingan perusahaan, dan mengurangi asimetri informasi antara pihak manajemen, *shareholder*, dan kreditor. Maka dari itu kualitas penerapan *corporate governance* di dalam sebuah perusahaan dapat mempengaruhi biaya utang (Rebecca, 2012).

Perusahaan dengan tingkat utang tinggi mempunyai dampak yang besar. Salah satu akibat yang ditimbulkan adalah tidak mampunya perusahaan untuk membayar kewajibannya. Perusahaan membutuhkan *monitoring* kinerja dari manajemen perusahaan tersebut. Penerapan *good corporate governance* yang dilakukan perusahaan dapat mengatasi dan mengurangi kebijakan manajemen

yang merugikan perusahaan. Sehingga, tingkat utang juga dapat dipengaruhi oleh penerapan *corporate governance* yang dilakukan perusahaan (Ashkhabi dan Agustina, 2015).

Penelitian mengenai pengaruh penghindaran pajak dan *good corporate governance* terhadap *cost of debt* telah beberapa kali dilakukan. Tetapi beberapa dari mereka meneliti kedua hal tersebut secara terpisah. Dari penelitian-penelitian tersebut dapat diketahui bahwa masih banyak perbedaan hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan sampel dan metode yang digunakan dalam melakukan pengukuran setiap variabel.

Ada beberapa hasil penelitian tentang pengaruh *corporate governance* terhadap *cost of debt*. Hasil empiris Ashkhabi dan Agustina (2015) membuktikan bahwa *corporate governance* yang di proksi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *cost of debt*. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2015) dan Sutarti et al. (2018) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap biaya utang, tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh Zahro et al. (2018) tidak berpengaruh. Sedangkan *corporate governance* yang di proksi oleh kepemilikan manajerial dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Saputra dan Faizal (2016) bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *cost of debt*. Berbanding terbalik dari hasil penelitian Ashkhabi dan Agustina (2015) dan Rahmawati (2015) bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *cost of debt*. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sutarti et al. (2018) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap biaya

utang, tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2015) dan Zahro et al. (2018) berbanding terbalik yaitu berpengaruh negatif terhadap biaya utang.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut membuat peneliti tertarik mengangkat kembali topik mengenai *cost of debt* dengan menggunakan penghindaran pajak dan *corporate governance* yang di proksi dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit sebagai variabel independen. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 – 2017.

Pemilihan perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi bangunan didasari atas aktivitas usahanya sebagian besar dengan modal yang besar. Dengan besarnya modal yang dibutuhkan perusahaan mengharuskan melakukan pengelolaan modal secara efektif dan efisien sehingga diharapkan mampu menghasilkan laba yang besar pula. Perusahaan tersebut adalah perusahaan dengan orientasi jangka panjang sehingga pengelolaan modalnya harus berkelanjutan untuk menunjang kehidupan perusahaan di masa datang. Di Indonesia sendiri, perusahaan *property, real esatate*, dan konstruksi bangunan memunjukkan kenaikan kinerja yang signifikan selama beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat dibuktikan dari data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik mengenai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Sektor Ekonomi dalam rentang waktu 2013-2017. Dari data tersebut diketahui bahwa unit proyek sektor *property, real estate*, dan konstruksi bangunan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh penghindaran pajak

dan *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit apakah berpengaruh terhadap *cost of debt*. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka mendorong peneliti untuk mengambil judul **“PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *COST OF DEBT*: STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN DI INDONESIA.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap *cost of debt* pada perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *cost of debt* pada perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *cost of debt* pada perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017?

4. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *cost of debt* pada perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017?
5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *cost of debt* pada perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, bahwa penelitian ini adalah untuk:

1. Menguji pengaruh penghindaran pajak terhadap *cost of debt* pada perusahaan-perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017.
2. Menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap *cost of debt* pada perusahaan-perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017.
3. Menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *cost of debt* pada perusahaan-perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017.
4. Menguji pengaruh dewan komisaris independen terhadap *cost of debt* pada perusahaan-perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017.

5. Menguji pengaruh komite audit terhadap *cost of debt* pada perusahaan-perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dalam bidang akuntansi khususnya mengenai penghindaran pajak, *good corporate governance*, dan biaya utang (*cost of debt*).

##### b. Manfaat Praktis

Manfaat yang diharapkan dan ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran dampak dari dilakukannya penghindaran pajak dan penerapan *good corporate governance* pada perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi bangunan di Indonesia.
2. Memberikan pengetahuan bagi setiap perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi bangunan di Indonesia tentang pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan sehat serta dapat dijadikan sebagai panduan dalam melakukan *control management* dalam penerapan ataupun implementasi mekanisme *corporate governance* maupun penghindaran pajak.

3. Dijadikan sebagai bahan informasi penelitian dan diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai tambahan pengetahuan dalam rangka pengembangan penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan referensi tambahan yang berkaitan dengan objek bahasan maupun variabel yang digunakan.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dibagi menjadi lima tahapan bagian utama, yang terdiri atas lima bab utama yang saling berkaitan. Kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas mengenai teori-teori yang digunakan, berisi tentang tinjauan literatur mengenai teori-teori yang berkaitan dalam penelitian ini dan teori ini akan digunakan untuk menganalisis penelitian ini yang terdiri dari landasan, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Selain itu, bab ini juga menjelaskan penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai penunjang dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan tema penelitian yang akan diangkat.

### BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan pendekatan penelitian, variabel-variabel penelitian dan definisi operasional penelitian, ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel yang meliputi penentuan populasi, sampel, dan prosedur pengumpulan data, jenis dan sumber data, terakhir penjelasan mengenai teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

### BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai deskripsi umum objek penelitian dan penjelasan mengenai penelitian yang telah dilakukan, analisis data, pembuktian hipotesis, dan interpretasi hasil dari penelitian dari data yang telah diolah sehingga nanti hasilnya dapat diambil kesimpulan apakah hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya diterima atau ditolak.

### BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi simpulan, keterbatasan, implikasi dari penelitian yang dilakukan oleh penulis serta saran yang terkait dengan penelitian ini nantinya diharapkan dapat berguna untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi (*agency theory*) yaitu hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). Seorang pemilik perusahaan tidak dapat menjalankan dan mengawasi seluruh kegiatan operasional perusahaannya. Oleh sebab itu pemilik mendelegasikan wewenang kepada seorang manajer yang berperan untuk menjalankan semua kegiatan operasi perusahaan sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan dalam perusahaan tersebut. *Agency theory* menjelaskan tentang hubungan kontrak antara pemilik modal (*principal*) dan manajer (*agent*) (Jensen dan Meckling, 1976).

Kontrak kerja yang terjalin antara pihak *principal* dan pihak *agent* sulit tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan (*conflict of interest*). Konflik keagenan yang terjadi karena adanya asimetri informasi di mana pihak *agent* sebagai pengelola perusahaan secara langsung lebih memahami kondisi internal perusahaan jika dibandingkan dengan pihak *principal* yang memiliki sedikit informasi tentang kondisi perusahaan. Perbedaan tujuan dan preferensi risiko antara *agent* dan *principal* akan timbul dimana manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemilik, sehingga mendorong *agent* untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada *principal*. *Principal* tidak dapat dengan

mudah memantau tindakan *agent*, karena *principal* tidak memiliki informasi yang mencukupi mengenai kinerja *agent*, *principal* tidak pernah dapat merasa pasti bagaimana usaha *agent* memberikan kontribusi pada hasil aktual perusahaan. Situasi yang demikian disebut sebagai asimetri informasi (Rahmawati, 2015).

Teori agensi menyatakan bahwa apabila terdapat pemisahan antara pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan maka akan muncul permasalahan agensi karena masing-masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya (Jensen dan Meckling, 1976). Untuk meminimalisasi permasalahan agensi tersebut, maka dibuatlah kontrak-kontrak dalam perusahaan baik kontrak antara pemegang saham dengan manajernya maupun kontrak antara manajemen dengan karyawan, pemasok, dan kreditor.

Teori agensi juga mengungkapkan bahwa juga terdapat konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Dalam konflik agensi juga terdapat usaha penyalarsan kepentingan namun dalam usaha-usaha ini akan muncul biaya yang disebut *agency cost* atau biaya agensi. Masalah agensi ini akan menimbulkan biaya agensi yang berhubungan dengan biaya pengawasan dan biaya lainnya dari pemegang saham untuk memastikan para manajer bertindak untuk kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Berdasarkan teori agensi, pembiayaan utang dapat digunakan sebagai salah satu alat yang berguna dari tata kelola untuk mengurangi konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Utang dapat digunakan sebagai mekanisme tata kelola untuk mengurangi biaya agensi dari arus kas bebas

yang tersedia bagi para manajer untuk digunakan kembali bagi para investor bukan digunakan untuk kepentingan para manajer (Jensen dan Meckling, 1976).

Konflik antara agen dan kreditor menurut Atmaja (2003) muncul jika: (1) manajemen mengambil proyek-proyek yang risikonya lebih besar daripada yang diperkirakan oleh kreditor, atau (2) perusahaan meningkatkan jumlah utang hingga mencapai tingkatan yang lebih tinggi daripada yang diperkirakan kreditor. Masalah-masalah keagenan dalam hubungan kerjasama antara manajemen perusahaan dan kreditor dapat menyebabkan timbulnya *default risk*, yaitu kemungkinan perusahaan tidak mampu atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban utangnya yang dapat menyebabkan memburuknya kondisi banyak kreditor dan investor. Sebelum memberikan pinjaman kepada perusahaan, kreditor akan menilai terlebih dahulu *default risk* yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki *default risk* yang tinggi akan menanggung biaya utang yang tinggi, dan sebaliknya perusahaan yang memiliki *default risk* yang rendah akan menanggung biaya utang yang rendah juga.

Konflik keagenan dapat diminimalisasi melalui mekanisme pengawasan dan pengendalian, yakni melalui kepemilikan manajerial, dan kebijakan utang. Kepemilikan manajerial dapat menyelaraskan kepentingan manajer dengan kepentingan *shareholders* karena manajer juga bertindak sebagai *shareholders*. Peningkatan utang menyebabkan bunga yang harus dibayarkan perusahaan setiap periode semakin tinggi, sehingga *free cash flow* dalam perusahaan akan berkurang dan kesempatan manajer melakukan tindakan *perquisite* dapat diminimalisasi. Peningkatan utang akan mengurangi pendanaan melalui ekuitas eksternal,

sehingga mengurangi konflik antara manajer dan *shareholders*. Dengan adanya utang, kinerja manajer akan diawasi oleh pihak kreditor, sehingga manajer yang masih ingin mempertahankan jabatannya akan memperbaiki kinerjanya agar selaras dengan kepentingan pihak eksternal. *Agency theory* dapat terwujud dalam kontrak kerja yang akan mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan.

Salah satu cara yang digunakan untuk membatasi perilaku oportunistik manajemen dan untuk menghindari akibat *agency problem* adalah dengan menerapkan *corporate governance* (Watts 2003). Sebagai agen, manajer bertanggungjawab secara moral untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik. Dalam hal ini, penerapan *corporate governance* diharapkan dapat memberi kepercayaan terhadap manajemen sebagai agen dalam mengelola kekayaan prinsipal sebagai pemilik modal. Dengan kata lain, *corporate governance* digunakan sebagai alat untuk menjamin bahwa direksi dan manajer akan bertindak yang terbaik bagi kepentingan *stakeholder* pada umumnya dan *shareholder* pada khususnya. Maka dari itu diperlukan suatu *corporate governance* yang baik untuk mengatasi *agency problem* yang terjadi antara pemegang saham dan manajer. Dengan adanya *corporate governance* yang dapat mengatur hubungan antara kedua belah pihak ini maka dapat mengurangi atau mencegah terjadinya *agency conflict*.

### **2.1.2 Pajak**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Soemitro (2011) mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Salah satu jenis pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh). Subjek PPh meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap. Badan sebagai subjek pajak adalah suatu bentuk usaha atau bentuk non-usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD), persekutuan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya (Suandy, 2011). PPh untuk Wajib Pajak (WP) Badan dihitung dengan mengalikan tarif dan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang kemudian di akui sebagai beban. Oleh karena itu, untuk menghasilkan laba yang optimal, perusahaan cenderung melakukan penghematan pajak.

Dari sisi negara, pajak adalah penerimaan, namun dari sisi perusahaan, pajak adalah biaya yang mengurangi laba. Oleh karena itu, perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya tersebut untuk mengoptimalkan laba mereka. Upaya

dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun bahwa legalitas dari *tax management* tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan. Menurut Lumbantoruan (1994) dalam Suandy (2011) definisi manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Tujuan dari manajemen pajak adalah menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Tujuan perencanaan pajak adalah untuk merekayasa usaha wajib pajak agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang ada untuk memaksimalkan jumlah laba setelah pajak, karena dalam hal ini pajak merupakan unsur pengurang laba. Secara garis besar perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun komersial.

Suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak dan atau penghindaran pajak yang dapat diterima dan sama sekali bukan karena penyeludupan pajak yang tidak dapat diterima oleh fiskus dan tidak akan ditolerir. Dari berbagai definisi di atas, penulis dapat merumuskan bahwa perencanaan pajak

merupakan sebuah proses pengorganisasian usaha wajib pajak dengan sedemikian rupa sehingga utang pajaknya berada pada posisi paling rendah, namun dengan tetap berada di koridor yang masih dimungkinkan dalam peraturan perundang-undangan.

### **2.1.3 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

*Tax avoidance* atau penghindaran pajak adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri.

Lim (2011) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. *Tax avoidance* merupakan bagian dari *tax planning* yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. *Tax avoidance* secara hukum pajak tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif. Berbeda dengan *tax evasion* (penggelapan pajak), yang merupakan usaha-usaha memperkecil jumlah pajak dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. Pelaku *tax evasion* dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Selain *tax avoidance* juga terdapat istilah *tax aggressive* dan *tax sheltering*. Pengertian *tax aggressive* seperti yang diungkapkan oleh Frank et al. (2009)

merupakan tindakan yang bertujuan mengurangi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak. *Tax aggressive* menggunakan metode yang diklasifikasikan atau tidak diklasifikasikan sebagai penggelapan pajak (*tax evasion*), meskipun tidak semua tindakan yang dilakukan melanggar aturan akan tetapi metode yang digunakan oleh perusahaan membuat perusahaan diasumsikan lebih agresif. Sedangkan *tax sheltering* dalam penelitian Graham dan Tucker (2006) mendefinisikan *tax shelters* berdasarkan US kongres (Dewan Komite Perpajakan, 1999) sebagai upaya untuk menghindari pajak tanpa terkena risiko ekonomi atau kerugian. Berdasarkan definisi tersebut *tax aggressiveness* dan *tax sheltering* dapat diartikan juga sebagai *tax avoidance*.

Dalam literatur keagenan, *tax avoidance* dapat memfasilitasi kesempatan manajerial untuk melakukan manipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai. *Tax avoidance* menggambarkan sebuah kelanjutan dari strategi perencanaan perpajakan perusahaan. Aktivitas *tax avoidance* memunculkan kesempatan bagi manajemen dalam melakukan aktivitas yang didesain untuk menutupi berita buruk atau menyesatkan investor (Desai dan Dharmapala, 2006). Menurut komite fiskal OECD (Spitz, 1983) terdapat tiga karakter *tax avoidance* yaitu:

1. *Artificial arrangement*

Yaitu adanya unsur artifisial, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak ada, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.

## 2. Celah undang-undang (*loopholes*)

Karakter semacam ini, sering memanfaatkan celah undang-undang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal dalam undang-undang bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan.

## 3. Terdapat unsur kerahasiaan

Bahwa pada umumnya para konsultan yang ditunjuk oleh perusahaan untuk mengurus pajak menunjukkan cara untuk melakukan *tax avoidance* dengan syarat wajib pajak untuk menjaga kerahasiaan.

Menurut Slemrod (2004) dalam Hanlon dan Heitzman (2010), yang menyebabkan adanya penghindaran pajak perusahaan adalah tambahan faktor untuk perusahaan dalam mematuhi pajak yaitu terpisahnya antara kepemilikan dan kontrol dalam perusahaan. Adanya pemisahan kepemilikan dan kontrol dalam perusahaan dapat menyebabkan keputusan pajak perusahaan yang mencerminkan kepentingan manajemen.

### **2.1.4 *Good Corporate Governance***

*Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) mengemukakan, *Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.

Menurut Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 pasal 1 (satu) tentang Penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN memberikan pengertian bahwa *corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi BUMN untuk mengikat keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

*Good Corporate Governance* mengatur hubungan antara orang-orang yang berkepentingan di dalam sebuah perusahaan, baik itu *principal* maupun *agent* agar terjalin hubungan yang harmonis dan saling mendukung demi terciptanya suatu keuntungan bagi semua pihak dan mencapai tujuan perusahaan yang diinginkan. Adanya *Good Corporate Governance* akan membantu mengurangi dan mengatasi masalah-masalah yang terjadi didalam teori keagenan. Karena di dalam teori agensi dijelaskan bahwa terdapat hubungan antara pihak *principal* dan *agent* di mana pihak *principal* membagi kekuasaannya kepada pihak *agent* untuk menjalankan perusahaan dan mengambil keputusan sesuai keadaan. Hal ini dapat menyebabkan konflik kepentingan, karena masing-masing pihak akan mengutamakan kepentingannya masing-masing demi memperoleh keuntungan yang maksimal. Dengan adanya *Good Corporate Governance* diharapkan akan mampu mengatasi masalah ini. Menurut *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG, 2000), keuntungan yang diperoleh perusahaan apabila menerapkan konsep *good corporate governance* yakni meminimalkan *agency cost*,

meminimalkan *cost of capital*, meningkatkan nilai saham perusahaan, dan mengangkat citra perusahaan.

Mekanisme *corporate governance* dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu, internal dan eksternal. Mudyasani (2014) mengungkapkan bahwa mekanisme peranan pihak internal dan eksternal *corporate governance* perusahaan dapat membantu mengurangi ekspektasi biaya yang berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Mekanisme internal *corporate governance* merupakan mekanisme yang berada di dalam perusahaan, dan berasal dari dua pihak yakni, dewan komisaris sebagai titik tertinggi yang melakukan sistem pengendalian internal dan manajemen yang bertindak sebagai agen perusahaan.

Mekanisme internal berasal dari dewan komisaris, kontrol internal, dan fungsi internal audit. Penurunan ataupun peningkatan *agency cost* dipengaruhi oleh sejumlah variabel internal *corporate governance* yaitu, persentase non-eksekutif dan eksekutif direktur, proporsi dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan komite audit. Tidak hanya mekanisme internal *corporate governance* yang dapat mempengaruhi *agency cost*, mekanisme eksternal *corporate governance* dapat meningkatkan maupun menekan *agency cost*. Dalam penelitian ini, mekanisme eksternal *corporate governance* akan diprosikan dengan kepemilikan institusional.

Secara teoritis, penerapan GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan, karena dengan penerapan GCG yang baik dapat mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri

sendiri, dan umumnya *corporate governance* dapat meningkatkan tingkat kepercayaan para investor (Newell dan Wilson 2002). Meningkatnya tingkat kepercayaan tersebut disebabkan karena adanya penerapan GCG yang baik dianggap mampu memberikan perlindungan efektif terhadap investor dalam memperoleh kembali investasinya dengan wajar.

### **2.1.5 Kepemilikan Institusional**

Menurut Juniarti dan Sentosa (2009) kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional seperti pemerintah, perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi maupun kepemilikan lembaga dan perusahaan lain. Istilah investor institusional menurut Brancato (1997) mengacu kepada investor yang dilengkapi dengan manajemen profesional yang melakukan investasi atas nama pihak lain, baik sekelompok individu maupun sekelompok organisasi. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* yang dapat digunakan untuk mengendalikan *agency problem*. Adanya kepemilikan saham oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen karena mereka memiliki *voting power* untuk mengadakan perubahan pada saat manajemen sudah dianggap tidak efektif lagi dalam mengelola perusahaan (Ashbaugh et al, 2004 dalam Rebecca, 2012).

Para investor institusional ini biasanya bertindak sebagai pihak yang memonitor jalannya sebuah perusahaan, dan dalam melakukan monitoring investor institusional ini lebih berpihak kepada para pemegang saham, seperti yang dikatakan Mudiastuty dan Machfoedz (2003) dalam Wicaksono (2013) bahwa monitoring yang dilakukan oleh investor institusional tentunya akan menjamin kemakmuran pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional dalam sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang mencakup besar dalam pasar modal. Menurut Aziza (2016) kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang optimal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat mengurangi perilaku oportunistik manajer. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang akan diambil manajer. Hal ini karena investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba.

### **2.1.6 Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial merupakan perwujudan dari prinsip transparansi dari *good corporate governance*. Gideon (2005) mendefinisikan kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola. Indikator yang digunakan untuk mengukur

kepemilikan manajerial adalah persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dibagi dengan seluruh saham perusahaan yang beredar.

Dalam mengelola perusahaan manajemen harus transparan agar tidak terjadi konflik kepentingan dengan para pemegang saham sebagai pemilik. Saputri (2010) dalam Wicaksono (2013) menyatakan, jika suatu perusahaan memiliki kepemilikan manajerial yang tinggi, manajer jauh lebih peduli tentang kepentingan pemegang saham dan opsi saham akan memiliki insentif untuk kontribusi perusahaan. Dengan demikian, maka para manajer dapat bertindak lebih konsisten dan terbuka untuk menguntungkan diri pemegang saham daripada kepentingan pribadinya. Dan hal ini dapat mengurangi terjadinya *agency problem* didalam sebuah perusahaan.

Menurut Juniarti dan Sentosa (2009) dengan keinginan untuk meningkatkan kinerja perusahaan tersebut membuat manajemen akan berusaha untuk mewujudkannya sehingga membuat risiko perusahaan semakin kecil di mata kreditor dan akhirnya kreditor hanya meminta *return* yang kecil.

### **2.1.7 Dewan Komisaris Independen**

Menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governace* Indonesia adanya unsur komisaris independen dalam struktur organisasi perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan berfungsi untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang

terkait. Istilah dan keberadaan Komisaris Independen dari muncul setelah terbitnya Surat Edaran Bapepam Nomor: SE03/PM/2000 dan Peraturan Pencatatan Efek Nomor 339/BEJ/07-2001. Menurut ketentuan tersebut perusahaan publik yang tercatat di bursa wajib memiliki beberapa anggota dewan komisaris yang memenuhi kualifikasi sebagai komisaris independen yaitu jumlah komisaris independen adalah sekurangnya 30% dari seluruh jumlah anggota dewan komisaris, perlunya dibentuk komite audit serta keharusan perusahaan memiliki sekretaris perusahaan (*corporation secretary*).

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) menyatakan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan perusahaan dan diharapkan harus memiliki keahlian dalam bidang akuntansi atau keuangan.

Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good governance*. Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris perusahaan. Anggota dewan komisaris berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. Sehingga ukuran dewan komisaris adalah jumlah total anggota dewan komisaris, baik yang berasal internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan.

### **2.1.8 Komite Audit**

Berdasarkan Surat Edaran dari direksi Bursa Efek Indonesia No.SE-008/BEJ/12-2001 serta Pedoman Pembentukan Komite Audit menurut BAPEPAM perihal keanggotaan komite audit, disebutkan bahwa anggota komite audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, termasuk ketua komite audit. Variabel ini diukur dari jumlah anggota komite audit yang ada dalam satu perusahaan. Menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governace* Indonesia (2006) komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertugas membantu dewan komisaris untuk dapat memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut atas temuan hasil audit yang dilaksanakan oleh manajemen.

Fungsi pengawasan yang dijalankan komite audit meliputi lingkup manajemen perusahaan, informasi keuangan perusahaan, kinerja perusahaan dan risiko yang dihadapi perusahaan. Komite audit yang efektif dalam melakukan fungsi pengawasannya, memungkinkan kontrol terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga, konflik keagenan yang terjadi akibat perilaku oportunistik yang dilakukan manajemen dapat dikurangi. Aturan mengenai ukuran komite audit ini mengindikasikan pemerintah sebagai pembuat kebijakan menganggap penting keberadaan komite audit sebagai satu kesatuan integral dalam mengendalikan proses akuntansi perusahaan.

Tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal, dan kepatutan terhadap peraturan yang berlaku tertentu. Adanya komunikasi formal antara komite audit, auditor eksternal, dan auditor internal akan menjamin proses audit diantara kedua pihak audit tersebut dilakukan dengan baik. Proses audit internal dan eksternal yang baik akan meningkatkan akurasi dalam pelaporan keuangan dan kemudian meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan.

### **2.1.9 Biaya Utang (*Cost of Debt*)**

Struktur modal perusahaan umumnya terdiri dari ekuitas dan utang. Untuk mendapatkan modal semacam itu, ada biaya terkait dengan akuisisi dan kompensasi untuk penyedia modal, baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang seharusnya dipertimbangkan oleh manajemen dalam setiap keputusan pendanaan. Sebuah perusahaan dapat memperoleh dana yang dibutuhkan dengan cara menginvestasikan modal pribadi pemilik atau dengan cara utang. Utang ini dapat dilakukan dengan cara meminjam dana dari pihak ketiga dengan ketentuan dan syarat yang berlaku untuk mengembalikan dana tersebut. Utang dapat dibagi menjadi dua, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Keputusan yang dibuat oleh manajemen dalam memilih pembiayaan perusahaan melalui utang jangka pendek atau utang jangka panjang harus dipertimbangkan dengan baik dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan saat itu.

Menurut Rebecca (2012) utang digunakan sebagai salah satu alternatif pendanaan bagi perusahaan karena memberikan keuntungan berupa *tax saving* yang disebabkan bunga pinjaman bersifat *tax deductible* sehingga pada akhirnya mengurangi besarnya pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Sehingga dapat diartikan bahwa biaya ekuitas adalah pinjaman yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk memperoleh dana yang dibutuhkan, pinjaman ini menghasilkan bunga pinjaman yang harus dibayarkan perusahaan kepada kreditor.

Utang biasanya digunakan sebagai alternatif pembiayaan bagi perusahaan karena memberikan keuntungan dari penghematan pajak karena bunga pinjaman adalah pengurangan pajak sehingga pada akhirnya mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Menurut Kraus dan Litzenberger (1973), penghematan pajak adalah manfaat utama dari penggunaan utang. Utang terjadi ketika kreditor setuju meminjamkan jumlah aset mereka kepada debitor. Ketika membuat keputusan investasi, pemberi pinjaman biasanya akan memperkirakan profil risiko perusahaan. Profil risiko akan menentukan pengembalian yang diminta oleh kreditor atau secara kolektif, biaya utang (Blom dan Schauten, 2006 dalam Saputra, 2017).

Berdasarkan penjelasan di atas, biaya utang dapat diartikan sebagai tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemberi pinjaman ketika membuat pendanaan di perusahaan. Biaya utang juga termasuk tingkat bunga yang harus dibayar oleh perusahaan saat memberikan pinjaman. Sedangkan menurut Singgih (2008) dalam Juniarti dan Sentosa (2009), biaya utang adalah tingkat bunga sebelum pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemberi pinjaman. Biaya utang dihitung dari

besarnya beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut dalam periode satu tahun dibagi dengan jumlah pinjaman yang menghasilkan bunga tersebut.

Menurut Bhojraj dan Sengupta (2003) besarnya biaya utang ditentukan oleh karakteristik perusahaan, *agency cost* dan *asymmetry information* yang terjadi pada perusahaan. Bagi perusahaan biaya utang yang diberikan oleh kreditor atas suatu pendanaan merupakan hal yang sangat penting, hal ini dikarenakan semakin rendah tingkat biaya utang yang diberikan kreditor maka beban yang akan ditanggung perusahaan juga akan semakin kecil sehingga akan berdampak positif bagi laba yang dihasilkan. Bhojraj dan Sengupta (2003) menunjukkan bahwa *cost of debt* sebuah perusahaan ditentukan karakteristik perusahaan tersebut, dapat dilihat dari penerbitan obligasi yang mempengaruhi risiko kebangkrutan, *agency cost* dan masalah asimetri informasi. *Cost of debt* sebagai salah satu unsur penting dalam struktur modal dipengaruhi oleh faktor pajak yaitu *debt tax shields* di mana beban bunga dapat dijadikan sebagai sebagai pengurang pajak terutang.

Menurut Fitriani (2017) salah satu jenis risiko yaitu risiko perusahaan, risiko terkait dengan perusahaan yang menerbitkan suatu sekuritas, misalnya karakteristik dan cara manajemen mengelola suatu perusahaan. *Return* dan risiko merupakan *trade-off*. Maka ketika kreditor menilai risiko perusahaan semakin besar, bunga yang akan dibebankan kreditor pada perusahaan tersebut semakin besar juga. Hal ini menunjukkan bahwa *cost of debt* akan sangat bergantung pada karakteristik perusahaan dan cara manajemen mengelola perusahaan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Hasil
Masri dan Martani (2012)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Cost of debt</i> (Y)</li> <li>2. <i>Tax avoidance</i> (X)</li> <li>3. Perubahan tarif pajak (Z<sub>1</sub>)</li> <li>4. Struktur kepemilikan keluarga (Z<sub>2</sub>)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Tax avoidance</i> berpengaruh positif terhadap <i>cost of debt</i></li> <li>2. Perubahan tarif pajak berpengaruh negatif terhadap hubungan <i>tax avoidance</i> terhadap <i>cost of debt</i></li> <li>3. Struktur kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap hubungan <i>tax avoidance</i> terhadap <i>cost of debt</i></li> </ol>
Erniawati (2014)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya utang (Y)</li> <li>2. <i>Tax avoidance</i> (X)</li> <li>3. Kepemilikan institusional (Z)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel <i>tax avoidance</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap biaya utang</li> <li>2. Variabel moderasi kepemilikan institusional yang memenuhi syarat hubungan istimewa tidak memperkuat pengaruh <i>tax avoidance</i> terhadap <i>cost of debt</i></li> <li>3. Secara statistik tidak ada perbedaan yang bermakna antara penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>) yang dilakukan kepemilikan institusional yang memenuhi syarat hubungan istimewa dengan kepemilikan institusional yang tidak memenuhi syarat hubungan istimewa</li> </ol>

Tabel 2.1. (lanjutan).

<p>Ashkhabi dan Agustina (2015)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya utang (Y)</li> <li>2. <i>Corporate governance index</i> (X<sub>1</sub>)</li> <li>3. Kepemilikan manajerial (X<sub>2</sub>)</li> <li>4. Kepemilikan institusional (X<sub>3</sub>)</li> <li>5. Ukuran Perusahaan (X<sub>4</sub>)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Corporate governance index</i> terbukti berpengaruh negatif terhadap biaya utang</li> <li>2. Kepemilikan manajerial terbukti tidak berpengaruh terhadap biaya utang</li> <li>3. Kepemilikan institusional terbukti berpengaruh negatif terhadap biaya utang</li> <li>4. Ukuran perusahaan terbukti berpengaruh positif terhadap biaya utang</li> </ol>
<p>Saputra dan Faizal (2016)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Cost of debt</i> (Y)</li> <li>2. <i>Corporate governance perception index</i> (X<sub>1</sub>)</li> <li>3. <i>Managerial ownership</i> (X<sub>2</sub>)</li> <li>4. <i>Government ownership</i> (X<sub>3</sub>)</li> <li>5. <i>Sales growth</i> (X<sub>4</sub>)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Corporate governance perception index</i> does not influence the cost of debt</li> <li>2. <i>Managerial ownership</i> influence the cost of debt</li> <li>3. <i>Government ownership</i> does not influence the cost of debt</li> <li>4. <i>Sales growth</i> does not influence the cost of debt</li> </ol>
<p>Shin dan Woo (2017)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Cost of debt</i> (Y)</li> <li>2. <i>Tax avoidance</i> (X)</li> <li>3. <i>Debt ratio</i> (Z<sub>1</sub>)</li> <li>4. <i>Return on asset</i> (Z<sub>2</sub>)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>The empirical result shows that tax avoidance is significantly positively associated with cost of debt</i></li> <li>2. <i>The debt ratio decreases the positive relation between tax avoidance and the cost of debt capital</i></li> <li>3. <i>The interaction variable of tax avoidance and the return on assets is significantly positively associated with the cost of debt capital.</i></li> </ol>

Tabel 2.1. (lanjutan).

<p>Sutarti et al. (2018)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya utang (Y)</li> <li>2. Ukuran dewan komisaris (X<sub>1</sub>)</li> <li>3. Komite audit (X<sub>2</sub>)</li> <li>4. Penghindaran pajak (X<sub>3</sub>)</li> <li>5. Kepemilikan institusional (X<sub>4</sub>)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ukuran dewan komisaris secara statistik berpengaruh positif signifikan terhadap biaya utang</li> <li>2. Ukuran komite audit secara statistik berpengaruh positif signifikan terhadap biaya utang</li> <li>3. Pada variabel penghindaran pajak secara statistik berpengaruh positif signifikan terhadap biaya utang</li> <li>4. Variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap biaya utang.</li> </ol>
<p>Zahro et al. (2018)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Cost of debt</i> (Y)</li> <li>2. <i>Tax avoidance</i> (X<sub>1</sub>)</li> <li>3. Proporsi dewan komisaris independen (X<sub>2</sub>)</li> <li>4. Ukuran dewan direksi (X<sub>3</sub>)</li> <li>5. Ukuran komite audit (X<sub>4</sub>)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel <i>tax avoidance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>cost of debt</i>.</li> <li>2. Variabel proksi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap terhadap variabel <i>cost of debt</i></li> <li>3. Variabel direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>cost of debt</i></li> <li>4. Komite audit tidak berpengaruh terhadap variabel <i>cost of debt</i></li> </ol>

Sumber: diolah dari berbagai referensi

## 2.3 Hipotesis Penelitian

### 2.3.1 Penghindaran Pajak dan *Cost of Debt*

Ketika memberikan pinjaman utang, kreditor akan mendapat imbal hasil (*return*) yang berupa bunga yang merupakan *cost of debt* bagi perusahaan dan menanggung risiko. *Return* dan risiko merupakan *trade-off*. Semakin besar kreditor menilai risiko yang dimiliki suatu perusahaan, semakin besar pula bunga yang akan dibebankan kepada kreditor pada perusahaan tersebut. Ini berarti *cost of debt* yang ditanggung perusahaan dipengaruhi oleh penilaian kreditor mengenai risiko perusahaan itu. Risiko perusahaan dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan dan cara manajemen mengelola perusahaan. Pengelolaan yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh laba maksimal dapat menggunakan cara pengelolaan beban pajak agar serendah-rendahnya dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang dikenal dengan penghindaran pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Erniawati (2014) menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap *cost of debt*, sedangkan penelitian Zahro et al. (2018) menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh positif terhadap *cost of debt*. Berbeda dengan penelitian Masri dan Martani (2012), Rahmawati (2015), Shin dan Woo (2017) telah berhasil membuktikan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap *cost of debt*. Selain itu, dari persamaan regresinya dapat dilihat bahwa koefisien untuk variabel penghindaran pajak adalah positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil temuan penelitian tersebut adalah semakin besar tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, semakin besar pula *cost of debt* yang harus

ditanggungnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, dipandang kreditor sebagai tindakan yang mengandung risiko, sehingga justru meningkatkan *cost of debt*.

Hasil penelitian Shin dan Woo (2017), Rahmawati (2015) sejalan dengan penelitian Masri dan Martani (2012) yang juga menyimpulkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap *cost of debt*. Hasil penelitian ini penghindaran pajak terbukti menyebabkan *cost of debt* menjadi lebih besar, karena kreditor menilai perilaku penghindaran pajak tersebut sebagai suatu risiko. Menurut Masri dan Martani (2012), dengan pemerintah mengeluarkan UU nomor 28 tahun 2007 tentang KUP, melakukan reformasi perpajakan, dan meningkatkan pemberantasan korupsi, kreditor menilai penghindaran pajak sebagai tindakan yang berisiko sehingga membebankan bunga yang lebih besar.

Penelitian menurut Shin dan Woo (2017) penghindaran pajak secara signifikan berhubungan positif dengan *cost of debt*. Hasil ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak dianggap sebagai sinyal meningkatnya risiko informasi; dengan demikian, investor menuntut pengembalian yang lebih tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki kecenderungan kuat untuk menghindari pajak menanggung *cost of debt* yang tinggi. Oleh karena itu, penghindaran pajak yang agresif merusak transparansi akunting perusahaan dan meningkatkan ketidakpastian harapan pemegang saham terkait penghasilan di masa mendatang di pasar modal. Ketika transparansi akuntansi perusahaan terganggu, asimetri informasi di antara pihak yang berkepentingan meningkat. Situasi ini mengganggu efisiensi pasar modal dan meningkatkan ketidakpastian

investasi, akibatnya biaya modal meningkat. Pemegang saham di pasar modal meremehkan keandalan informasi akuntansi untuk perusahaan yang berusaha menghindari pajak. Oleh karena itu, karena risiko informasi yang diakui oleh pemegang saham di pasar modal meningkat dan pemegang saham menuntut pengembalian yang tinggi mengakibatkan *cost of debt* meningkat.

Bhojraj dan Sengupta (2003), menunjukkan bahwa *cost of debt* sebuah perusahaan ditentukan karakteristik perusahaan tersebut, dapat dilihat dari penerbitan obligasi yang mempengaruhi risiko kebangkrutan, *agency cost* dan masalah asimetri informasi. *Cost of debt* sebagai salah satu unsur penting dalam struktur modal yang dipengaruhi oleh faktor pajak yaitu *debt tax shields* dimana beban bunga dapat dijadikan sebagai sebagai pengurang pajak terutang.

Menurut Anggoro dan Septiani (2015) penghindaran pajak dapat memicu konflik agensi antara kepentingan manajer dengan kepentingan investor. Perusahaan memiliki alasan dalam melakukan praktik penghindaran pajak yaitu untuk mengurangi utang pajak yang nantinya akan dibayarkan oleh perusahaan. Hal tersebut tentunya merupakan pencerminan dari perilaku oportunistik manajer yang seharusnya memberikan informasi yang akurat kepada para investor. Perilaku penghindaran pajak dapat mencerminkan adanya kepentingan pribadi manajer dengan cara manipulasi pajak yang mengakibatkan adanya informasi yang tidak benar, kegiatan tersebut tentunya memberikan efek kepada para pemegang saham dimana mengakibatkan menurunnya kandungan informasi dari laporan keuangan perusahaan, sehingga akan berpotensi terjadinya asimetri informasi antara perusahaan dengan para pemegang saham (Anggoro dan Septiani, 2015).

Jadi, semakin tinggi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajer maka akan semakin berkurang kandungan informasi dari laporan keuangan. Dengan semakin berkurangnya kandungan informasi yang disajikan maka akan berdampak pada semakin rendahnya nilai perusahaan. Jika nilai perusahaan menurun dari penghindaran pajak, kreditor mungkin tidak dapat menerima pembayaran pokok dan bunga. Dengan demikian, kreditor akan menuntut biaya modal yang lebih tinggi. Menurut Chen et al. (2011) transparansi akuntansi dan kualitas pelaporan keuangan terganggu ketika kecenderungan penghindaran pajak tinggi. Oleh karena itu, jika perusahaan yang berusaha menghindari pajak mendapatkan evaluasi yang tidak menguntungkan, kreditor akan menuntut pengembalian yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap *Cost of debt* pada perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017.

### **2.3.2 Kepemilikan Institusional dan *Cost of Debt***

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* yang dapat digunakan untuk mengendalikan *agency problem*. Bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Peran investor institusional dianggap mampu

untuk mengawasi dari setiap keputusan yang diambil oleh manajer perusahaan, hal ini dilakukan guna menjamin keuntungan para pemegang saham agar modal yang mereka berikan bisa dipergunakan dan diatur sebaik mungkin.

Menurut Aziza (2016) dengan adanya kepemilikan institusional maka terdapat kontrol yang lebih baik. Karena dengan adanya kepemilikan institusional dapat mempengaruhi kinerja sebuah perusahaan dengan meningkatkan pengawasan yang ketat dari pihak investor institusional lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial, sehingga dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan *debt holders*.

Cornett et al. (2006) dalam Juniarti (2009) menemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak investor institusional dapat membatasi perilaku manajemen. Tindakan pengawasan yang ketat dapat menurunkan risiko perusahaan yang tidak diinginkan, dengan menurunnya risiko suatu perusahaan maka tingkat bunga yang diberikan kreditor pun akan lebih kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh Bhojraj dan Sengupta (2003) yang dikutip oleh Rebecca (2011) menemukan bahwa kepemilikan institusional dapat mengurangi biaya utang perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya *monitoring* yang efektif oleh pihak institusional dapat mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Meningkatnya kinerja perusahaan membuat risiko perusahaan menjadi lebih kecil sehingga *return* yang diinginkan oleh kreditor pun menjadi lebih rendah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Juniarti dan Sentosa (2009) dan Ashkhabi dan Agustina (2015) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap biaya utang. Hasil yang ditunjukkan dari penelitian yang dilakukan oleh Ashkhabi dan Agustina (2015) menunjukkan bahwa adanya kepemilikan institusional memberikan pengaruh yang berarti sebagai tindakan *monitoring* yang dilakukan kepada pihak manajemen. Semakin besar tingkat kepemilikan saham oleh institusi, maka semakin efektif pula mekanisme kontrol terhadap kinerja manajemen. Perusahaan dengan sistem pengawasan yang bagus dan tepat akan meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, hal ini dapat mengurangi risiko suatu perusahaan. Dengan pengawasan dari pihak institusional yang tinggi maka risiko suatu perusahaan akan kecurangan pun berkurang dan dengan tingkat risiko yang lebih rendah tentu saja hal ini berdampak pada *cost of debt* yang ditanggung perusahaan sebagai *return* yang diminta oleh kreditor. Maka dari itu, biaya utang yang diterima oleh perusahaan menjadi lebih rendah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *Cost of debt* pada perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017.

### 2.3.3 Kepemilikan Manajerial dan *Cost of Debt*

Kepemilikan manajerial diartikan sebagai proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dengan ikutnya manajer dalam pengambilan keputusan dapat mengurangi atau mencegah *agency conflict* yang terjadi diantara para prinsipal dan agen. Adanya kepemilikan saham manajerial dalam suatu perusahaan akan mendorong penyatuan kepentingan antara agen dan prinsipal sehingga manajer akan bertindak sesuai dengan yang diharapkan pemegang saham (Jansen dan Meckling, 1976).

Ashkhabi dan Agustina (2015) dalam penelitiannya kepemilikan manajerial dapat mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan perusahaan, salah satunya keputusan pendanaan yang dilakukan perusahaan. Pihak manajemen puncak akan mendorong dilakukannya pengendalian terhadap perusahaan oleh manajemen, maka mereka akan lebih cenderung untuk menggunakan prinsip ekonomi liberal. Saputra dan Faizal (2016) menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap biaya utang (*cost of debt*) dan hasil pengujian menyatakan bahwa kepemilikan manajerial mempunyai hubungan positif terhadap kebijakan utang. Hasil ini kontradiktif dengan hasil dari Ashkhabi dan Agustina (2015) dan Rahmawati (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak signifikan dalam menjelaskan biaya utang. Sementara itu, hasil penelitian Saputra dan Faizal (2016) kepemilikan manajerial saham di perusahaan tidak menjamin kreditor untuk menurunkan biaya utang mereka, karena manajer cenderung terlibat dalam kegiatan yang merugikan kepentingan penerbit utang. Penerbit utang dapat membebankan tingkat biaya utang yang lebih tinggi untuk

mengambil risiko terkait dengan kepemilikan manajerial. Dengan demikian, meskipun perusahaan harus memperhatikan proporsi kepemilikan manajerial untuk memperkuat pengawasan perusahaan, penerbit utang tidak mempertimbangkan hal itu.

Bedasarkan variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap biaya utang. Temuan penelitian yang dilakukan oleh Ashkhabi dan Agustina (2015), Rahmawati (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak mempunyai hubungan pengaruh terhadap kebijakan utang. Hal tersebut disebabkan karena jumlah proporsi kepemilikan oleh manajerial cenderung kecil sehingga pihak manajemen merasa enggan untuk bekerja secara maksimal. Manajemen tidak memiliki kendali untuk menentukan kebijakan utang karena banyak dikendalikan oleh pemilik mayoritas, sedangkan manajer hanya memberikan pendapat atau masukan. Selain itu menurut Juniarti dan Sentosa (2009) menyatakan bahwa karena kecilnya kepemilikan manajerial sehingga pihak manajemen bisa saja bertindak kurang hati-hati dalam menentukan kebijakan utang yang dilakukan

Berdasarkan uraian tersebut, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *Cost of debt* pada perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017.

### 2.3.4 Dewan Komisaris Independen dan *Cost of Debt*

Jesica (2014) menyatakan bahwa dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang dan peran dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi *monitoring* dari kebijakan direksi. Berdasarkan perspektif agensi, fungsi *monitoring* sangat krusial dalam melimitasi tindakan oportunistik agen dan mereduksi biaya keagenan. Terkait dengan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat tersebut, maka dewan komisaris dengan ukuran yang lebih besar akan mampu menjalankan fungsinya dengan lebih baik, sehingga *agency cost* akan menurun.

Adanya komisaris independen dalam sebuah perusahaan dinilai cukup penting. Hanya saja hal tersebut tidak dibarengi dengan adanya tindakan yang serius dalam menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Seperti yang dikatakan oleh Boediono (2005) dalam Juniarti dan Sentosa (2009) penempatan atau penambahan anggota dewan komisaris independen dimungkinkan hanya sekedar memenuhi kebutuhan formal, sementara pemegang saham mayoritas (pengendali) masih memegang peranan penting sehingga kinerja dewan tidak meningkat.

Zahro et al. (2018) dari hasil penelitiannya dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap biaya utang (*cost of debt*), penelitian yang dilakukan oleh Zahro et al. (2018) menyatakan hal ini dimungkinkan karena keberadaan dewan komisaris independen dalam struktur komisaris hanya sebagai pemenuhan

persyaratan dan merupakan suatu keharusan bagi setiap perusahaan dalam menerapkan *good corporate governance*.

Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2015) dan Sutarti et al. (2018) bahwa komisaris independen berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *cost of debt*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Rahmawati (2015), dapat diketahui hasil bahwa selama periode pengamatan ada kecenderungan semakin besar rasio komisaris independen maka tidak berpengaruh terhadap tingkat *cost of debt* yang akan dibayarkan oleh suatu perusahaan. Hasil ini berdasarkan pada data penelitian yang mana *cost of debt* yang berkontribusi lebih dominan berasal dari pinjaman dari pihak bank, dan keberadaan komisaris independen tidak begitu menjadi perhatian atau pertimbangan bagi pihak kreditor dalam berinvestasi sehingga komisaris independen cenderung tidak memiliki peran dalam menentukan kebijakan utang dalam perusahaan. Hal ini diduga karena jumlah komisaris independen yang kecil tersebut sehingga tidak dapat mengurangi pihak manajemen dalam menentukan besarnya biaya utang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *Cost of debt* pada perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017.

### **2.3.5 Komite Audit dan *Cost of Debt***

Tugas utama dari komite audit pada prinsipnya adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Hal tersebut terutama berkaitan dengan sistem pengendalian internal perusahaan, kemudian memastikan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan efektivitas fungsi audit yang kemudian diverifikasi oleh eksternal auditor. Apabila komite audit menjalankan fungsinya dengan baik maka tindakan manajemen akan dapat dimonitor agar tetap berfokus pada peningkatan kinerja untuk kemakmuran pemegang saham. Para komite audit diperlukan untuk mengetahui apakah kebijakan dan keputusan yang diambil oleh manajer sudah tepat atau belum.

Keberadaan komite audit dalam perusahaan juga dapat meningkatkan kualitas laba dan nilai perusahaan (Made, 2016). Pada penelitian Sutarti et al. (2018) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *cost of debt*. Sedangkan pada penelitian Rahmawati (2015) dan Zahro et al. (2018) variabel komite audit terhadap biaya utang menunjukkan hasil berbeda. Penelitian ini menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap biaya utang. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kenyataan bahwa pembentukan komite audit yang mempunyai keahlian di bidang akuntansi dan keuangan hanya didasarkan pada pemenuhan peraturan yang berlaku. Selain itu komite audit yang telah dibentuk oleh perusahaan tidak menjalankan fungsi dan peranannya secara efektif sehingga komite audit tidak mempunyai pengaruh terhadap *cost of debt*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut:

H5 : Proporsi komite audit berpengaruh negatif terhadap *Cost of debt* pada perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini lebih menekankan analisis terhadap data-data yang bersifat kuantitatif yang kemudian diolah sehingga menghasilkan kesimpulan. Kesimpulan dapat mengetahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti dan akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti. Pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang konkrit/empiris, objektif, terukur, rasional dan sistematis (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini minimal terdapat dua variabel yang dihubungkan dan penelitian ini berfungsi menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

#### **3.2 Populasi dan Sampel Penelitian**

Penjelasan atas populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini populasi yakni wilayah generalisasi atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

### **3.2.1 Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi bangunan yang terdaftar tahun 2015-2017 dipilih karena perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi bangunan adalah perusahaan padat modal yaitu didasari atas aktivitas usahanya dengan modal yang besar. Dengan besarnya modal yang dibutuhkan perusahaan mengharuskan melakukan pengelolaan modal secara efektif dan efisien sehingga diharapkan mampu menghasilkan laba yang besar pula. Perusahaan tersebut adalah perusahaan dengan orientasi jangka panjang sehingga pengelolaan modalnya harus berkelanjutan untuk menunjang kehidupan perusahaan di masa datang.

### **3.2.2 Sampel**

Teknik pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, dimana pengambilan sampel dilakukan dengan menetapkan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan agar relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria data yang digunakan sebagai sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017 dan tidak delisting selama periode pengamatan penelitian.
2. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan per-tanggal 31 Desember.

3. Menerbitkan dan mempublikasikan laporan tahunan (*annual report*) secara lengkap selama tahun 2015-2017.
4. Laporan keuangan disajikan dalam mata uang rupiah.
5. Perusahaan tidak mengalami kerugian secara komersial maupun fiskal selama tahun penelitian.
6. Perusahaan memiliki utang berbunga, jangka pendek maupun jangka panjang.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data yang digunakan adalah data sekunder yakni laporan keuangan perusahaan yang diperoleh dari *website* Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan *website* perusahaan. Untuk penggunaan data, penelitian kali ini menggunakan data tahun 2015, 2016, 2017 yang terdiri dari perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penggunaan data sekunder dengan tujuan efisiensi karena data lebih dari satu variabel yang digunakan.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu penggunaan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran dan pencatatan

informasi yang diperlukan pada data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data dalam penelitian ini didapatkan dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan *website* perusahaan. Selain itu juga peneliti juga melakukan penelitian kepustakaan dengan memperoleh data dengan membaca dan mempelajari yang berkaitan dengan pembahasan yang sedang diteliti melalui berbagai literatur seperti artikel, buku, jurnal, maupun situs dari internet dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### **3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

#### **3.5.1 Variabel Dependen**

Dalam penelitian ini variabel dependen yang akan digunakan adalah biaya utang (*cost of debt*). Pengukuran yang digunakan dalam variabel biaya utang (*cost of debt*) adalah dihitung dari besarnya beban bunga perusahaan dalam periode satu tahun dibagi dengan jumlah rata-rata pinjaman jangka pendek dan jangka panjang yang menghasilkan bunga pinjaman selama tahun tersebut (Pittman dan Fortin, 2004) dalam Lim (2011). Rumus yang digunakan untuk menghitung *cost of debt* (COD) adalah:

$$\text{Cost of Debt} = \frac{\text{Interest Expense}}{\text{Average Interest Bearing Debt}}$$

### 3.5.2 Variabel Independen

#### 1. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) ialah usaha untuk mengurangi, atau bahkan meniadakan utang pajak yang harus dibayar perusahaan kepada negara dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku. Menurut Dyreng et. al. (2010) variabel penghindaran pajak dapat dihitung dengan *Cash Effectives Tax Rate (CETR)* yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Penggunaan pengukuran *CETR* dalam mengukur penghindaran pajak menurut Dyreng et al. (2010) baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *CETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. *CETR* digunakan karena diharapkan dapat mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak suatu perusahaan (Chen et al. 2010).

Semakin besar *CETR* ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Adapun rumus untuk menghitung *CETR* adalah sebagai berikut:

$$\text{CASH ETR} = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

## 2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, bank, perusahaan sekuritas, perusahaan asuransi dan investor luar negeri, kecuali kepemilikan investor individual (Lim, 2011). Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Untuk mengukur kepemilikan institusional, akan diukur dengan proporsi saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar di perusahaan tersebut kepemilikan institusional dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{Total saham yang dimiliki Institusi}}{\text{Total saham beredar}}$$

## 3. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial (*managerial ownership*) yaitu jumlah saham yang dimiliki oleh para manajer dalam sebuah perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) dalam penelitiannya menyatakan bahwa salah satu cara untuk mengurangi biaya agensi adalah dengan meningkatkan jumlah modal yang dimiliki oleh manajer. Itu lebih banyak jumlah saham dalam perusahaan yang dimiliki oleh manajer akan membuat keselarasan antara kepentingan pemegang saham (prinsipal) dan manajemen (agen). Lafond dan Rouchowdhury (2007) dalam Rahmawati (2015), indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan manajerial merupakan

persentase kepemilikan saham oleh pihak manajemen dibandingkan dengan jumlah saham perusahaan yang beredar secara keseluruhan. Dalam penelitian ini akan dilihat persentase kepemilikan manajerial atau dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$KM = \frac{\text{Kepemilikan saham oleh manajemen}}{\text{Total saham beredar}} \times 100\%$$

#### 4. Komisaris Independen

Yesika (2013) mengatakan bahwa kriteria komisaris independen komisaris yang berasal dari luar emiten, tidak mempunyai saham emiten baik langsung maupun tidak langsung, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan komisaris, direksi, dan pemegang saham. Komposisi dewan komisaris independen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proporsi Dewan Komisaris Independen (DKI) dalam suatu dewan komisaris perusahaan. Komisaris independen dapat diukur dengan cara menghitung rasio antara jumlah anggota komisaris independen dibagi dengan total keseluruhan anggota dewan komisaris, yang dapat dirumuskan dengan (Yesika, 2013):

$$DKI = \frac{\text{jumlah anggota komisaris independen}}{\text{jumlah seluruh anggota dewan komisaris}}$$

## 5. Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Bapepam LK No.IX.1.5 menyatakan bahwa komite audit sekurang-kurangnya harus terdiri dari 1 (satu) orang komisaris independen yang bertindak sebagai ketua komite di dalam perusahaan. Dipilih secara independen, mempunyai kapabilitas dan kompetensi dalam bidang akuntansi dan keuangan, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota, lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik yang independen. Setiap jenis perusahaan, karakteristik komite auditnya pun berbeda, dalam penelitian ini digunakan jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan sebagai alat ukur variabel komite audit (Chen *et al.* 2010).

$$KA = \sum \text{Anggota Komite Audit}$$

### 3.6 Teknik Analisis Data

#### 3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Dalam uji statistik deskriptif akan menghasilkan deskripsi dari data yang digunakan, sehingga menjadikan informasi lebih jelas dan lebih mudah untuk dipahami. Statistik deskriptif akan memberikan gambaran deskripsi umum dari sebuah informasi dari variabel penelitian mengenai nilai rata-rata (*mean*), nilai tengah (*median*), nilai yang sering muncul (*modus*), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum (Ghozali, 2013). Statistik deskriptif dapat menjelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini sehingga

informasi tersebut dapat dipahami dengan lebih mudah, selain itu dapat menyajikan ukuran-ukuran numerik yang penting bagi data sampel.

### **3.6.2 Uji Asumsi Klasik**

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang akan digunakan dalam penelitian ini. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar data dikatakan layak digunakan adalah data tersebut harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung *multikolinearitas*, *heteroskedastisitas*, dan *autokorelasi*. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda perlu terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari:

#### **1. Uji Normalitas**

Menurut Ghozali (2013), model regresi yang baik memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal. Data yang terdistribusi normal akan memperkecil kemungkinan terjadinya bias. Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah didalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*. Uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* merupakan uji statistik non parametik yang dapat pula digunakan untuk menguji apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Dalam uji

*Kolmogorov–Smirnov*, suatu data dikatakan normal jika nilai *asymptotic significance* lebih dari 0,05. Sedangkan jika hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan di bawah 0,05 maka data variabel terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2013). Dasar pengambilan keputusan dalam uji K-S adalah sebagai berikut:

- a. Apabila probabilitas nilai Z uji K–S tidak signifikan  $< 0,05$  secara statistik maka  $H_0$  ditolak, yang berarti data terdistribusi tidak normal.
- b. Apabila probabilitas nilai Z uji K-S signifikan  $> 0,05$  secara statistik  $H_0$  diterima, yang berarti data terdistribusi normal. Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

$H_0$  = Data residual berdistribusi normal

$H_1$  = Data residual tidak berdistribusi normal

## 2. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya hubungan korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2013). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi dapat dilihat dari besaran nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai *tolerance* digunakan untuk mengukur variabilitas

independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena  $VIF = 1/tolerance$ ). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan tidak adanya multikolinearitas adalah nilai  $VIF < 10$  dan nilai *tolerance*  $> 0,10$ . Variabel yang terdeteksi adanya multikolinearitas tidak dapat ditoleransi dan variabel tersebut harus dikeluarkan dari model regresi agar hasil yang diperoleh tidak bias (Ghozali, 2013).

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali, (2013) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah pada suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika tidak disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang memiliki sifat homoskedastisitas.

Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual yang telah di *studentized* (Ghozali 2013). Menurut Ghozali (2013) dasar analisis heteroskedastisitas adalah:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis dengan grafik plot memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil plotting. Semakin sedikit jumlah pengamatan semakin sulit menginterpretasikan hasil grafik plot. Oleh karena itu diperlukan uji statistik lain yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil (Ghozali, 2013).

#### 4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode saat ini ( $t$ ) dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ( $t-1$ ). Model yang baik adalah yang tidak memiliki autokorelasi. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*) yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya (Ghozali, 2013).

Dan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi maka akan digunakan uji statistik *Durbin Watson* (DW) dan pengambilan keputusan mengenai ada atau tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:

- a. Autokorelasi positif terjadi jika nilai DW dibawah -2 ( $DW < -2$ ).
- b. Autokorelasi tidak terjadi jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau  $-2 \leq DW \leq 2$ .
- c. Autokorelasi negatif terjadi jika nilai DW diatas 2 atau ( $DW > 2$ ).

### **3.6.3 Analisis Regresi**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model persamaan analisis regresi yaitu analisis regresi berganda (*multiple linear regression analysis*), dalam analisis regresi selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen serta seberapa besar hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen diasumsikan random/stokastik, yang berarti mempunyai distribusi probabilistik. Variabel independen/bebas diasumsikan memiliki nilai tetap (Ghozali, 2013). Data yang berhasil dikumpulkan akan diproses dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak SPSS (*Statistical Package for the Social Science*) untuk memberikan gambaran mengenai hubungan yang jelas antar variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis regresi berupa koefisien masing-masing variabel

independen, yang diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Adapun persamaan regresi berganda yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Cod}_{i,t} = \alpha + \beta_1 \text{Cash ETR}_{i,t} + \beta_2 \text{KI}_{i,t} + \beta_3 \text{KM}_{i,t} + \beta_4 \text{DKI}_{i,t} + \beta_5 \text{KA}_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Keterangan :

$\text{Cod}_{i,t}$  : *Cost of Debt* (biaya utang) perusahaan i pada tahun t

$\alpha$  : Konstanta

$\text{Cash ETR}_{i,t}$  : Penghindaran pajak (proksi *Cash ETR*) perusahaan i pada tahun t

$\text{KI}_{i,t}$  : Kepemilikan institusional perusahaan i pada tahun t

$\text{KM}_{i,t}$  : Kepemilikan manajerial perusahaan i pada tahun t

$\text{DKI}_{i,t}$  : Proporsi dewan komisaris independen perusahaan i pada tahun t

$\text{KA}_{i,t}$  : Komite audit perusahaan i pada tahun t

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ : Koefisien regresi

$\varepsilon$  : *Error term*

### 3.6.4 Uji Hipotesis

#### 1. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R2*)

Menurut Ghozali (2013) uji koefisien determinasi bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen (bebas) menjelaskan variabel dependen (terikat) yang dilihat melalui *adjusted R2*. *Adjusted R2* ini digunakan karena variabel bebas dalam penelitian ini lebih dari dua. Nilainya terletak antara nol (0) dan satu (1). Jika hasil yang diperoleh  $> 0,5$ , maka model yang digunakan dianggap cukup handal dalam membuat estimasi. Apabila nilai  $R^2$  lebih kecil maka kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Semakin besar angka *adjusted R2* maka semakin baik model yang digunakan untuk menjelaskan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Kelemahan mendasar dalam penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel bebas maka nilai  $R^2$  pasti meningkat walaupun variabel tersebut berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted R2* pada saat mengevaluasi manakah model regresi terbaik (Ghozali, 2013).

## 2. Uji Parsial (Uji t)

Ghozali, (2013) menyatakan uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel individu independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Apabila t hitung yang diperoleh lebih besar dari t tabel berarti t hitung signifikan yang berarti hipotesis diterima. Sebaliknya apabila t hitung yang diperoleh lebih kecil dari t tabel maka berarti hipotesis ditolak. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan level signifikan 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Kriteria pengujian hipotesis dengan uji t adalah sebagai berikut:

- a. Apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak, ini menyatakan bahwa variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen atau terikat.
- b. Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima, ini menyatakan bahwa variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen atau terikat.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan/*annual report* perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Sumber data yang digunakan berasal dari situs Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), yang berupa laporan keuangan yang diterbitkan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Sedangkan pemilihan sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, dengan jumlah keseluruhan perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 adalah 63 perusahaan. Tabel 4.1 berikut ini menyajikan kriteria pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 4.1 Pemilihan Sampel Penelitian

Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah
Perusahaan <i>property, real estate</i> , dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI tahun 2017	63
Perusahaan <i>property, real estate</i> , dan konstruksi bangunan yang <i>listing</i> setelah tahun 2015	(9)
Perusahaan <i>property, real estate</i> , dan konstruksi bangunan yang <i>delisting</i> tahun 2015-2017	0
Perusahaan menerbitkan laporan tahunan secara lengkap	(3)
Perusahaan menerbitkan laporan keuangan per 31 desember serta laporan keuangan disajikan dalam Rupiah	0
Laporan keuangan memiliki data yang dibutuhkan dalam penelitian selama periode 3 tahun (2015-2017)	(21)
Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode penelitian	(3)
<b>Total sampel penelitian</b>	<b>27</b>
<b>Total observasi penelitian tahun 2015 s.d 2017</b>	<b>81</b>

Sumber: data sekunder, diolah

Berdasarkan tabel 4.1, maka dapat dilihat bahwa jumlah perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi bangunan yang menjadi sampel penelitian berjumlah 27 perusahaan. Dengan tahun pengamatan sebanyak 3 tahun berturut-turut, sehingga total sampel menjadi 81 sampel yaitu 27 perusahaan x 3 tahun observasi. Sampel tersebut dipilih karena memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan dalam penelitian ini.

## 4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif

	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	81	.0001160	.4064870	.068703911	.0763911832
KI	81	.0101018	.8033724	.237275519	.2205566559
KM	81	.0000002	.8317178	.118024713	.2282768352
DKI	81	.2000000	.6666667	.378439153	.0841755907
KA	81	2	5	3.09	.728
COD	81	.0001107	.2146339	.080452694	.0519833928
Valid n (listwise)	81				

Sumber: data sekunder, diolah

Tabel 4.2 menyajikan statistik deskriptif yang meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan deviasi standar. Nilai minimum (maksimum) untuk penghindaran pajak yang di proksi CETR adalah 0,0001 (0,4064), nilai rata-rata (deviasi standar) CETR adalah 0,0687 (0,0763). Hal ini berarti rata-rata perusahaan sampel memiliki penghindaran pajak yang rendah karena nilai rata-rata lebih rendah dari nilai maksimum sebesar 0,4064. Nilai minimum (maksimum) untuk kepemilikan institusional adalah 0,0101 (0,8033), dan rata-rata (deviasi standar) kepemilikan institusional adalah 0,2372 (0,2205). Hal ini berarti rata-rata perusahaan sampel memiliki tingkat kepemilikan saham institusional sebesar 23,72%.

Nilai minimum (maksimum) untuk kepemilikan saham manajerial adalah 0,0000 (0,8317), dan rata-rata (deviasi standar) kepemilikan manajerial adalah

0,1180 (0,2282). Hal ini berarti rata-rata perusahaan sampel memiliki tingkat kepemilikan saham manajerial sebesar 11,8%. Nilai minimum (maksimum) untuk proporsi dewan komisaris independen adalah 0,2000 (0,6666), dan rata-rata (deviasi standar) dewan komisaris independen adalah 0,3782 (0,0841). Nilai rata-rata variabel dewan komisaris independen sebesar 0,3782 atau 37,82% mengindikasikan bahwa rata-rata sampel sudah memenuhi batas minimal dari peraturan yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM yaitu sebesar 30% dari jumlah dewan komisaris. Nilai minimum (maksimum) untuk anggota komite audit adalah 2 (5), dan rata-rata (deviasi standar) anggota komite audit adalah 3,09 (0,728). Nilai rata-rata tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata sampel sudah memenuhi batas minimal dari peraturan yang telah ditetapkan yaitu sebesar 30%. Nilai minimum (maksimum) untuk *cost of debt* adalah 0,0001 (0,2146), dan rata-rata (deviasi standar) *cost of debt* perusahaan adalah 0,0804 (0,0519). Nilai rata-rata COD lebih besar dibanding nilai deviasi standar menunjukkan bahwa data terdistribusi normal. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 menanggung *cost of debt* sebesar 8,04% dari rata-rata liabilitasnya baik liabilitas jangka panjang maupun jangka pendek.

### 4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan nilai yang efisien dan tidak bias atau BLUE (*Best Linear Unbias Estimator*) dari satu persamaan regresi berganda, maka perlu dilakukannya pengujian untuk mengetahui model regresi yang dihasilkan memenuhi persyaratan asumsi klasik (Ghozali, 2013).

#### 4.3.1 Hasil Uji Normalitas

Model regresi yang baik memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal. Data yang terdistribusi normal akan memperkecil kemungkinan terjadinya bias. Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah didalam suatu model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
n		81
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.04061907
	Absolute	.072
Most Extreme Differences	Positive	.071
	Negative	-.072
Kolmogorov-Smirnov Z		.649
Asymp. Sig. (2-tailed)		.794

Sumber: data sekunder, diolah

Dari tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi (*p-value*) mempunyai nilai 0,794 lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa nilai signifikansi (*p-value*) seluruh variabel mempunyai nilai yang lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa data dalam penelitian ini telah terdistribusi dengan normal.

### 4.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas terjadi jika nilai *tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti terjadi hubungan yang cukup besar antara variabel independen dan tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95% (koefisien lemah tidak lebih besar dari 5). Jika *varian inflation factor (VIF)* lebih besar dari 10 maka terjadi multikolinearitas, apabila *VIF* lebih kecil dari 10 dapat dikatakan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model adalah dapat dipercaya dan objektif.

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.136	.029		4.702	.000		
CETR	.245	.063	.360	3.899	.000	.953	1.050
KI	-.058	.023	-.248	-2.486	.015	.821	1.218
KM	-.052	.022	-.226	-2.330	.023	.864	1.158
DKI	-.014	.060	-.022	-.231	.818	.877	1.141
KA	-.015	.007	-.215	-2.130	.036	.801	1.248

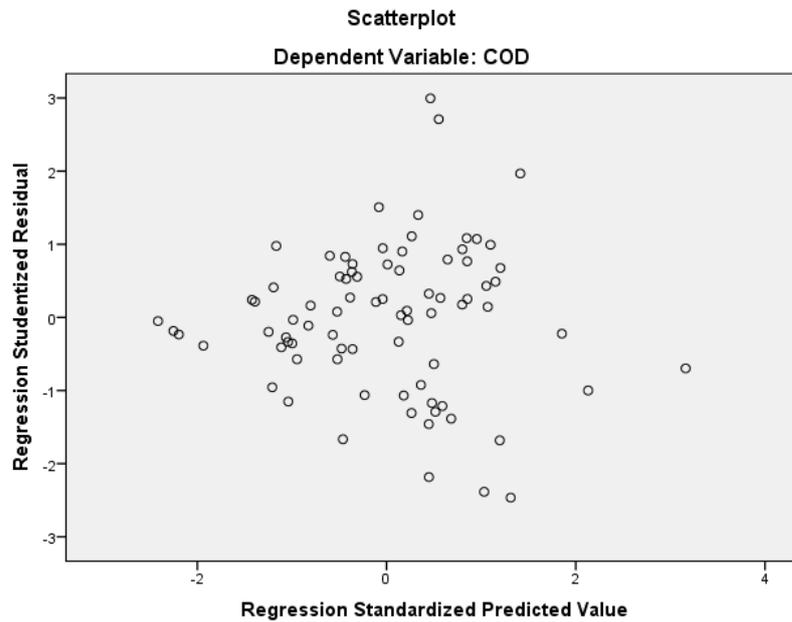
Sumber: data sekunder, diolah

Berdasarkan uji multikolinieritas pada tabel 4.4 di atas, dapat dilihat bahwa hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10 (10%) yang artinya bahwa korelasi antar variabel independen tersebut nilainya kurang dari 95%, dan hasil dari *varian inflation factor* (VIF) menunjukkan bahwa variabel penghindaran pajak, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10. Dimana, jika nilai *tolerance* lebih dari 0,10 atau 10% dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dalam pengujian data tersebut tidak terdapat korelasi antar variabel independen atau tidak terjadi multikolinieritas.

#### **4.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Cara menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas, yaitu dengan grafik *Scatterplot* apabila titik-titik menyebar di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Berikut ini adalah gambar hasil uji heteroskedastisitas disajikan dalam bentuk grafik *scatterplot*:

Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: data sekunder, diolah

Berdasarkan Gambar 4.1 di atas menunjukkan bahwa titik menyebar dan tidak membentuk pola khusus. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada variabel yang digunakan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

#### 4.3.4 Hasil Uji Autokorelasi

Untuk melihat ada atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi maka dilakukan pengujian Durbin-Watson (DW test). Berikut ini hasil berdasarkan uji Durbin-Watson:

Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.624 <sup>a</sup>	.389	.349	.0419511976	1.148

Sumber: data sekunder, diolah

Hasil pengujian diperoleh nilai  $DW = 1,148$  sedangkan  $D_{U_{tabel}} = 0,0419$  nilai Durbin-Watson sebesar 1,148. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 81 ( $n = 81$ ) dan jumlah variabel independen adalah 5 ( $k = 5$ ). Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa hasil uji Durbin-Watson sebesar 1,148. Nilai DW berada pada  $-2 \leq DW \leq 2$  sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi.

#### 4.4 Hasil Uji Persamaan Regresi Linier Berganda

Adapun hasil dari regresi linier berganda berdasarkan pengolahan data menggunakan SPSS untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penghindaran pajak dan *corporate governance* (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap *cost of debt* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Hasil Uji Persamaan Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.136	.029		4.702	.000
CETR	.245	.063	.360	3.899	.000
KI	-.058	.023	-.248	-2.486	.015
KM	-.052	.022	-.226	-2.330	.023
DKI	-.014	.060	-.022	-.231	.818
KA	-.015	.007	-.215	-2.130	.036

Sumber: data sekunder, diolah

Dari tabel 4.6 di atas dapat dirumuskan suatu persamaan regresi untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap *cost of debt* sebagai berikut:

$$Y = 0,136 + 0,245 \text{ CETR} - 0,058 \text{ KI} - 0,052 \text{ KM} - 0,014 \text{ DKI} - 0,015 \text{ KA}$$

Koefisien-koefisien persamaan regresi linier berganda di atas dapat diartikan koefisien regresi untuk konstan sebesar 0,136 menunjukkan bahwa jika variabel penghindaran pajak, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit bernilai nol atau tidak naik ataupun turun atau bernilai konstan (tetap) maka nilai *cost of debt* adalah 0,136 satuan.

Variabel penghindaran pajak sebesar 0,245 bernilai positif menunjukkan bahwa jika variabel penghindaran pajak meningkat 1 satuan maka akan

meningkatkan *cost of debt* sebesar 0,245 satuan, dengan catatan variabel lain dianggap konstan.

Variabel kepemilikan institusional sebesar -0,058 bernilai negatif menunjukkan bahwa jika variabel kepemilikan institusional meningkat 1 satuan maka akan menurunkan *cost of debt* sebesar 0,058 satuan, dengan catatan variabel lain dianggap konstan.

Variabel kepemilikan manajerial sebesar -0,052 bernilai negatif menunjukkan bahwa jika variabel kepemilikan manajerial meningkat 1 satuan maka akan menurunkan *cost of debt* sebesar 0,052 satuan, dengan catatan variabel lain dianggap konstan.

Variabel dewan komisaris independen sebesar -0,014 bernilai negatif menunjukkan bahwa jika variabel dewan komisaris independen meningkat 1 satuan maka akan menurunkan *cost of debt* sebesar 0,014 satuan, dengan catatan variabel lain dianggap konstan.

Variabel komite audit sebesar -0,015 bernilai negatif menunjukkan bahwa jika variabel komite audit meningkat 1 satuan maka akan menurunkan *cost of debt* sebesar 0,015 satuan, dengan catatan variabel lain dianggap konstan.

## 4.5 Hasil Uji Hipotesis

### 4.5.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R2*)

Koefisien determinasi (*Adjusted R2*) merupakan suatu nilai (nilai proporsi) yang mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel independen yang digunakan dalam persamaan regresi, dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.624 <sup>a</sup>	.389	.349	.0419511976

Sumber: data sekunder, diolah

Berdasarkan Tabel 4.7, nilai koefisien determinasi terletak pada kolom *Adjusted R-Square*. Diketahui nilai koefisien determinasi sebesar  $R^2 = 0,349$ . Nilai tersebut berarti seluruh variabel independen (penghindaran pajak, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit) mempengaruhi variabel *cost of debt* sebesar 34,9%, sisanya sebesar 65,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

#### 4.5.2 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Adapun hasil dari uji regresi secara parsial (uji t) dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.136	.029		4.702	.000
CETR	.245	.063	.360	3.899	.000
1 KI	-.058	.023	-.248	-2.486	.015
KM	-.052	.022	-.226	-2.330	.023
DKI	-.014	.060	-.022	-.231	.818
KA	-.015	.007	-.215	-2.130	.036

Sumber: data sekunder, diolah

Koefisien regresi CETR bertanda positif sebesar 0,245 menyatakan bahwa variabel penghindaran pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap *cost of debt* secara signifikan karena mempunyai nilai signifikan (0,000) lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis 1 yang menyatakan “penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap *cost of debt*,” didukung.

Koefisien regresi KI bertanda negatif sebesar -0,058 menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang negatif terhadap *cost*

*of debt*, serta mempunyai nilai signifikan (0,015) lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis 2 yang menyatakan “kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *cost of debt*,” didukung.

Koefisien regresi KM bertanda negatif sebesar -0,052 menyatakan bahwa variabel kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang negatif terhadap *cost of debt*, serta mempunyai nilai signifikan (0,023) lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis 3 yang menyatakan “kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *cost of debt*,” didukung.

Koefisien regresi DKI bertanda negatif sebesar -0,014 menyatakan bahwa variabel dewan komisaris independen memiliki pengaruh yang negatif terhadap *cost of debt*, tetapi tidak signifikan karena mempunyai nilai signifikan (0,818) lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis 4 yang menyatakan “proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *cost of debt*,” tidak didukung.

Koefisien regresi KA bertanda negatif sebesar -0,015 menyatakan bahwa variabel komite audit memiliki pengaruh yang negatif terhadap *cost of debt*, serta mempunyai nilai signifikan (0,036) lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis 5 yang menyatakan “komite audit berpengaruh negatif terhadap *cost of debt*”, didukung.

## **4.6 Pembahasan Hasil Penelitian**

### **4.6.1 Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap *Cost of Debt***

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, dapat diketahui hasil pengujian hipotesis yang pertama bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *cost of debt*. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap *cost of debt*. Hal ini memberikan bukti bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak berpengaruh terhadap penggunaan utang yang lebih banyak akan menaikkan *cost of debt* di suatu perusahaan, semakin tinggi tingkat penghindaran pajak maka akan meningkatkan *cost of debt* secara signifikan..

Penghindaran pajak sengaja dilakukan perusahaan dalam rangka memperkecil tingkat pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan. Di dalam mengelola dan mengembangkan bisnis yang dijalankannya, perusahaan mempunyai sumber pendanaan salah satunya dari pinjaman kreditor atau investor. Perusahaan yang menggunakan liabilitas memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menggunakan liabilitas. Liabilitas tentunya akan menuntut *return* kepada kreditor. Tingkat *return* yang diberikan inilah yang akan menjadi *cost of debt* bagi perusahaan. *Cost of debt* adalah tingkat pengembalian yang diinginkan kreditor saat memberikan pendanaan kepada perusahaan, dikarenakan biaya utang merupakan biaya bisnis yang bisa menjadi pengurang dalam pajak (*tax deductible*).

Hasil ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak dianggap sebagai sinyal meningkatnya risiko informasi, dengan demikian, investor atau kreditor menuntut pengembalian yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki kecenderungan kuat untuk menghindari pajak menanggung *cost of debt* yang tinggi. Oleh karena itu, penghindaran pajak yang agresif merusak transparansi akunting perusahaan dan meningkatkan ketidakpastian harapan pemegang saham terkait penghasilan di masa mendatang. Ketika transparansi akuntansi perusahaan terganggu, asimetri informasi di antara pihak yang berkepentingan meningkat. Situasi ini mengganggu efisiensi pasar modal dan meningkatkan ketidakpastian investasi, akibatnya biaya modal meningkat. Kreditor atau investor di pasar modal meremehkan keandalan informasi akuntansi untuk perusahaan yang berusaha menghindari pajak. Oleh karena itu, karena risiko informasi yang diakui oleh investor di pasar modal meningkat dan kreditor atau investor menuntut pengembalian yang tinggi mengakibatkan *cost of debt* meningkat.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Masri dan Martani (2012), Shin dan Woo (2017), Sutarti et al. (2018) bahwa penghindaran pajak terbukti menyebabkan *cost of debt* menjadi besar karena kreditor lebih memandang perilaku penghindaran pajak sebagai tindakan yang mengandung risiko karena sering mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi negatif dan menunjukkan perilaku ketidakpatuhan. Hasil ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Erniawati (2014) dan Zahro et al. (2018) yang menunjukkan bahwa penghindaran

pajak bersifat substitusi terhadap *cost of debt*, perusahaan menggunakan biaya utang lebih sedikit ketika melakukan penghindaran pajak.

#### **4.6.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Cost of Debt***

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, dapat diketahui hasil pengujian hipotesis yang kedua bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *cost of debt*. Hal ini memberikan bukti bahwa semakin besar saham dari kepemilikan institusional perusahaan akan berpengaruh terhadap *cost of debt*. Penelitian ini mendukung teori agensi yang berpendapat bahwa kepemilikan institusional dapat mengurangi konflik keagenan, dikarenakan kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi jalannya suatu perusahaan. Sehingga kreditor memandang risiko perusahaan rendah dan tentu saja hal ini berdampak pada *cost of debt* yang ditanggung perusahaan sebagai *return* yang diminta oleh kreditor. Dengan kata lain, semakin besar tingkat kepemilikan saham oleh institusi, maka semakin efektif pula mekanisme kontrol terhadap kinerja manajemen yang tentu saja hal ini berdampak pada *cost of debt* yang ditanggung perusahaan.

Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Ashkhabi dan Agustina (2015) yang mengemukakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *cost of debt*. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *cost of debt*, berdasarkan pada data penelitian yang mana

*cost of debt* yang berkontribusi lebih dominan berasal dari pinjaman dari pihak bank, dan kepemilikan institusional dalam perusahaan tidak begitu menjadi perhatian bagi pihak kreditor dalam berinvestasi karena pada umumnya pihak kreditor lebih menekankan pada aspek finansial perusahaan berinvestasi, sehingga kepemilikan institusional cenderung tidak memiliki peran dalam menentukan kebijakan utang dalam perusahaan.

#### **4.6.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Cost of Debt***

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, dapat diketahui hasil pengujian hipotesis yang ketiga bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap *cost of debt*. Hal ini memberikan bukti bahwa semakin besar saham dari kepemilikan manajerial perusahaan akan berpengaruh terhadap *cost of debt* di suatu perusahaan. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pemegang saham terbesar merepresentasikan kelompok yang memegang kekuatan dalam voting, dan memiliki perusahaan, semakin tinggi persentase pemegang saham menunjukkan bahwa pemegang saham memiliki pengaruh yang lebih besar untuk mengontrol serta menentukan kebijakan yang di ambil perusahaan dan dapat memastikan kebijakan tersebut dapat menguntungkan mereka. Dengan memiliki kepemilikan manajerial lebih besar, kreditor memandang risiko perusahaan rendah sehingga akan menurunkan tingkat *cost of debt* pada perusahaan.

Hasil ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ashkhabi (2015) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *cost*

*of debt*. Hal tersebut disebabkan karena jumlah proporsi kepemilikan oleh manajerial cenderung kecil. Sehingga pihak manajemen hanya memberikan pendapat atau masukan. Selain itu manajemen tidak memiliki kendali untuk menentukan kebijakan utang, karena banyak dikendalikan oleh pemegang saham mayoritas, pemegang saham mayoritas yang lebih berhak dalam pengambilan keputusan. Pihak kreditor beranggapan perusahaan masih berisiko dan bisa saja pihak manajemen bertindak kurang hati-hati dalam menentukan kebijakan utang yang dilakukan.

#### **4.6.4 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Cost of Debt***

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, dapat diketahui hasil pengujian hipotesis keempat bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *cost of debt* perusahaan. Hal ini memberikan bukti bahwa selama periode pengamatan ada kecenderungan semakin kecil rasio komisaris independen maka tidak berpengaruh terhadap tingkat biaya utang (*cost of debt*) yang akan dibayarkan oleh suatu perusahaan. Hasil ini berdasarkan pada data penelitian yang mana *cost of debt* yang berkontribusi lebih dominan berasal dari pinjaman pihak bank, dan keberadaan dewan komisaris independen tidak begitu menjadi perhatian atau pertimbangan bagi pihak kreditor sehingga dewan komisaris independen cenderung tidak memiliki peran dalam menentukan kebijakan utang dalam perusahaan. Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, dan perusahaan itu sendiri baik dalam bentuk hubungan

bisnis maupun kekeluargaan. Dalam hal ini dewan komisaris independen tidak boleh melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam transaksi-transaksi dengan pihak ketiga.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zahro et al. (2018). Hal ini dimungkinkan karena keberadaan dewan komisaris independen dalam struktur komisaris perusahaan hanya sebagai pemenuhan persyaratan dan merupakan suatu keharusan bagi setiap perusahaan dalam menerapkan *good corporate governance*.

#### **4.6.5 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Cost of Debt***

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, dapat diketahui hasil pengujian hipotesis kelima bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *cost of debt* perusahaan. Hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian Sutarti et al. (2018) yang membuktikan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *cost of debt*. Komite audit adalah orang atau sekelompok orang sekurang kurangnya tiga orang yang independen di dalam perusahaan, yang dipilih secara independen serta mempunyai kapabilitas dan kompetensi dalam bidang akuntansi dan keuangan. Jika semakin sedikit komite audit yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan oleh komite audit sangat minim sehingga akan meningkatkan tindakan manajemen dalam menentukan keputusan perusahaan, begitu juga apabila semakin banyak jumlah komite audit dalam perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan pun akan sangat ketat sehingga akan mengurangi tindakan manajemen dalam menentukan kebijakan utang dan berpengaruh terhadap *cost of debt*.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

Penelitian ini merupakan studi yang melakukan analisis untuk menguji pengaruh penghindaran pajak, *good corporate governance* (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit) terhadap *cost of debt* pada perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga diperoleh 27 perusahaan yang memenuhi kriteria, dengan total sampel sebesar 81 data. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penghindaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *cost of debt* pada perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.
2. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *cost of debt* pada perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

3. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *cost of debt* pada perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.
4. Dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *cost of debt* pada perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.
5. Komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *cost of debt* pada perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu masih terdapatnya perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi bangunan yang tidak lengkap dalam menerbitkan *annual report* dan *financial report* selama tahun penelitian, masih terdapatnya perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi bangunan yang tidak lengkap dalam mengungkapkan *good corporate governance*, terbatasnya lingkup penelitian yaitu hanya perusahaan *property, real estate*, dan konstruksi bangunan, periode penelitian hanya 3 tahun yaitu 2015-2017, dan unsur-unsur *good corporate governance* didalam penelitian ini hanya dilihat dari kepemilikan

institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit.

### **5.3 Implikasi Penelitian**

Implikasi dari penelitian ini adalah (1) Perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* tidak perlu berupaya menghindari pajak untuk mengurangi biaya-biaya, termasuk beban pajak. (2) Perusahaan yang lebih besar diharapkan mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik dan perusahaan dapat mengelola asetnya dengan baik.

### **5.4 Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah diharapkan untuk menambahkan populasi perusahaan yang dijadikan sampel penelitian seperti perusahaan sektor pertambangan, sektor pertanian atau jenis sektor lainya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Serta untuk penelitian selanjutnya dapat menambah beberapa variabel independen yang mungkin berpengaruh terhadap *cost of debt*, misalkan seperti konservatisme akuntansi, *voluntary disclosure*, kinerja keuangan, *sales growth*, dan ukuran perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, S. T., & Septiani, A. 2015. "Analisis Perilaku Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi sebagai Variabel Moderating." *Diponegoro Journal of Accounting* 4 (4). Universitas Diponegoro.
- Ashkhabi, I. R., & Agustina, L. 2015. "Pengaruh *Corporate Governance*, Struktur Kepemilikan Perusahaan dan Ukuran Perusahaan terhadap Biaya Utang." *Accounting Analysis Journal* 4 (3): 1-8.
- Aziza, K. 2016. "Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Biaya Hutang dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi." Skripsi, Universitas Airlangga.
- Bapepam. Surat Edaran Bapepam. No. SE-IX.1.5. 2012, Tentang Peraturan Komite Audit. 2012.
- Bhojraj, S., & Sengupta, P. 2003. "Effect of Corporate Governance on Bond Ratings and Yields: The Role of Institutional Investors and Outside Directors." *Journal of Business* 76: 455-47.
- Boediono, G. S. B. 2005. "Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur." *Symposium Nasional Akuntansi VIII, IAI*.
- Chen, Y., Huang, S., Pereira, R., & Wang, J. 2011. "Corporate Tax Avoidance and Firm Opacity." Working Paper, University of Missouri. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1905076](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1905076)
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. 2006. "Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives." *Journal of Financial Economics* 79: 145-179.
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. 2010. "The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance." *The Accounting Review* 85: 1163-1189.
- Erniawati, I. 2014. "Analisis Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap Biaya Utang dan Kepemilikan Institusional." Skripsi, Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Fitriani, S. A. 2017. "Pengaruh Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) terhadap Biaya Utang pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia." Skripsi, Universitas Sumatra Utara.
- Frank, M., Lynch, L., & Rego, S. 2009. "Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting." *The Accounting Review* 64: 467-496.
- Ghozali, I. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Jakarta: Salemba Empat.
- Graham, T. 2006. "Tax Shelters and Corporate Debt Policy." *Journal of Financial Economics* 81: 563-594.

- Hanlon, M., & Heitzman, S. 2010. "A Review of Tax Research." *Journal of Accounting and Economics* 50: 127-178.
- Hestanto. 2017. "Penghindaran Pajak atau Perlawanan terhadap Wajib Pajak." Hestanto.web.id, 29 Juli. <https://www.hestanto.web.id/penghindaran-pajak/>
- Himawan, A. 2017. "Fitra: Setiap Tahun, Penghindaran Pajak Capai Rp110 Triliun." Suara, 30 November. <https://www.suara.com/bisnis/2017/11/30/190456/fitra-setiap-tahun-penghindaran-pajak-capai-rp110-triliun>
- Jensen, M. C., & Meckling W. H. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics* 3 (4): 305-360.
- Jesica, H. 2014. "Pengaruh Struktur Modal dan Mekanisme *Corporate Governance* terhadap *Agency Cost* Perusahaan LQ45 di BEI Tahun 2013." *Jurnal Bussiness and Economic Transformation towards AEC*.
- Juniarti, & Sentosa, A. A. 2009. "Pengaruh *Good Corporate Governance, Voluntary Disclosure* terhadap Biaya Hutang (*Costs of Debt*)." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 11 (2): 88-100.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. Pedoman umum GCG. [http://www.cicfcgi.org/news/files/Pedoman\\_GCG\\_060906.pdf](http://www.cicfcgi.org/news/files/Pedoman_GCG_060906.pdf)
- Kraus, A., & Litzenberger, R. 1973. "A State Preference Model of Optimal Financial Leverage." *Journal of Finance* 28 (4): 911-922.
- Lim, Y. 2011. "Tax Avoidance, Capital Structure and Cost of Debt: Korean Evidence." *Korea Advanced Institute of Science and Technology* 207-43.
- Made, A., & Sukartha, I. M. 2016. "Pengaruh *Corporate Governance* pada *Agency Cost*". *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 15 (2).
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mangoting, Y. 1999. "Tax planning: Sebuah Pengantar sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 1 (1): 43 – 53.
- Masri, I., & Martani, D. 2012. "Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap *Cost of Debt*." *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin.
- Mudyasani, P., & Putra, I. W. 2014. "Pengaruh *Good Corporate Governance* pada Biaya Keagenan". *E-Jurnal Akuntansi* 9 (3).
- Newell, R., & Wilson, G. 2002. "A Premium for Good Governance." *The MC Kinsey Quartely* 3: 20-23.
- Nugroho, D. R. 2014. "Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Biaya Ekuitas dan Biaya Utang." *Diponegoro Journal of Accounting* 3 (3): 1-12.
- Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Akuntansi. 2017. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

- Purwanti, N. 2014. "Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Biaya Hutang Pasca Perubahan Tarif Pajak Badan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Akuntansi Indonesia* 3: 113-128.
- Rahmawati. 2015. "Pengaruh Penghindaran Pajak dan *Good Corporate Governance* terhadap Biaya Utang." Skripsi, Universitas Negeri Padang.
- Rebecca, Y., & Siregar, S. V. 2012. "Pengaruh *Corporate Governance Index*, Kepemilikan Keluarga, dan Kepemilikan Institusional terhadap Biaya Ekuitas dan Biaya Utang: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI." *Symposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin.
- Saputra, M., & Faizal, M. 2016. "The Influence of Corporate Governance Perception Index, Managerial Ownership, Government Ownership and Sales Growth on Cost of Debt." *Journal of Research in Business, Economics and Management* 6 (2): 845-857.
- Saputro, R. E. 2018. "Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap Biaya Utang (*Cost of Debt*) dengan Transparansi Perusahaan sebagai Variabel Moderating." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Shin, H. J., & Woo, Y. S. 2017. "The Effect of Tax Avoidance on Cost of Debt Capital: Evidence from Korea." *S.Afr.J.Bus.Manage* 48 (4): 83-89.
- Simanjuntak, J. 2017. "Indonesia Masuk Peringkat ke-11 Penghindaran Pajak Perusahaan, Jepang No.3." *Tribun News*, 20 November. <http://www.tribunnews.com/internasional/2017/11/20/indonesia-masuk-peringkat-ke-11-penghindaran-pajak-perusahaan-jepang-no3>
- Suandy, E. 2011. Perencanaan Pajak Edisi 5. Salemba Empat.
- Suparman, R. A. 2017. "Menanti Berakhirnya Era Penghindaran Pajak." [kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id), 31 Oktober. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menanti-berakhirnya-era-penghindaran-pajak/>
- Sutarti, D. T., Andini, R., & Pranaditya, A. 2018. "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak terhadap Biaya Hutang dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderating." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi* 4 (4): 1-18.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Watts, R. L. 2003. "Conservatism in Accounting Part I: Explanation and Implications." *Accounting Horizon* 17: 207-221.
- Yesika, N. 2013. "Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dan Karakteristik Perusahaan terhadap Kinerja Lingkungan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Memiliki Peringkat pada PROPER dan Terdaftar dalam BEI pada Tahun 2010 dan 2011)". Skripsi, Universitas Diponegoro.
- Zahro, F., Afifudin., & Mawardi, M. C. 2018. "Pengaruh Penghindaran Pajak dan *Good Corporate Governance* terhadap *Cost of Debt*." *E-JRA* 7 (6): 62-76.

## DAFTAR LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1

Daftar Perusahaan *Property, Real Estate*, dan Konstruksi Bangunan yang  
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode tahun 2015-2017  
yang Dijadikan Sampel

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	ACST	PT Acset Indonusa Tbk.
2	APLN	PT Agung Podomoro Land Tbk.
3	BAPA	PT Bekasi Asri Pemula Tbk.
4	BEST	PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk.
5	CTRA	PT Ciputra Development Tbk.
6	DILD	PT Intiland Development Tbk.
7	EMDE	PT Megapolitan Developments Tbk.
8	FMII	PT Fortune Mate Indonesia Tbk.
9	GPRA	PT Perdana Gapura Prima Tbk.
10	IDPR	PT Indonesia Pondasi Raya Tbk.
11	KIJA	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk.
12	MMLP	PT Mega Manunggal Property Tbk.
13	MTLA	PT Metropolitan Land Tbk.
14	NRCA	PT Nusa Raya Cipta Tbk.
15	OMRE	PT Indonesia Prima Property Tbk.
16	PPRO	PT PP Properti Tbk.
17	PLIN	PT Plaza Indonesia Realty Tbk.
18	PTPP	PT PP Tbk.
19	PUDP	PT Pudjiadi Prestige Tbk.
20	PWON	PT Pakuwon Jati Tbk.
21	RDTX	PT Roda Vivatex Tbk.
22	RODA	PT Pikko Land Development Tbk.
23	SCBD	PT Danayasa Arthatama Tbk.
24	SMRA	PT Summarecon Agung Tbk.
25	TOTL	PT Total Bangun Persada Tbk.
26	WIKA	PT Wijaya Karya Tbk.
27	WSKT	PT Waskita Karya Tbk.

## LAMPIRAN 2

### Data Sampel Penelitian

Kode Perusahaan	Tahun	COD	CETR	KI	KM	DKI	KA
ACST	2015	0.071187113	0.0072886	0.0582540	0.0080000	0.25	3
	2016	0.113620745	0.1008600	0.0582540	0.0080000	0.333333	3
	2017	0.042416405	0.0190336	0.0582540	0.0080000	0.333333	3
APLN	2015	0.092729894	0.0194548	0.0772392	0.0005927	0.333333	4
	2016	0.098054931	0.0220585	0.0761140	0.0005011	0.5	4
	2017	0.099380498	0.0073351	0.0569312	0.0004363	0.5	4
BAPA	2015	0.13420815	0.0954670	0.1272657	0.0013358	0.333333	3
	2016	0.20682882	0.1072921	0.0127266	0.0013358	0.333333	2
	2017	0.110505746	0.0023518	0.0891529	0.0013358	0.333333	3
BEST	2015	0.111246134	0.0120745	0.0447863	0.0007256	0.4	3
	2016	0.12162683	0.0123998	0.0768568	0.0007256	0.2	3
	2017	0.139725843	0.1009779	0.0202880	0.0007256	0.4	3
CTRA	2015	0.070228324	0.0773458	0.1328989	0.0000602	0.333333	3
	2016	0.089458177	0.0116933	0.1580985	0.0000588	0.333333	3
	2017	0.08826631	0.0372981	0.4698923	0.0009118	0.375	3
DILD	2015	0.095690154	0.0003750	0.4213784	0.0000012	0.333333	3
	2016	0.138761151	0.0064682	0.4213784	0.0000002	0.333333	2
	2017	0.131888216	0.2572550	0.3995716	0.0000002	0.333333	2
EMDE	2015	0.110800256	0.2480542	0.0744000	0.1052209	0.5	2
	2016	0.109776654	0.0268998	0.0604170	0.0785498	0.4	2
	2017	0.050444589	0.1243446	0.1211167	0.0785199	0.4	2
FMII	2015	0.206353878	0.2069672	0.2374127	0.4667402	0.333333	3
	2016	0.214633889	0.2067497	0.2851893	0.4667402	0.333333	3
	2017	0.031993658	0.0121003	0.4667402	0.4119809	0.333333	3
GPRA	2015	0.108196285	0.0127018	0.1530884	0.0001746	0.333333	2
	2016	0.134310509	0.0070869	0.2302516	0.0004966	0.333333	2
	2017	0.148499656	0.0169697	0.2338276	0.0004966	0.333333	2
IDPR	2015	0.080200262	0.0133851	0.0170091	0.8317178	0.5	3
	2016	0.057496468	0.0296856	0.1017009	0.8317178	0.5	3
	2017	0.035458346	0.0270015	0.0170091	0.8317178	0.5	3
KIJA	2015	0.147006337	0.2039456	0.2584746	0.0002911	0.4	3
	2016	0.132366879	0.1677219	0.1888244	0.0001459	0.4	3

	2017	0.137893085	0.1519119	0.0414470	0.0310582	0.4	3
MMLP	2015	0.155642445	0.1248002	0.0580438	0.0070009	0.4	3
	2016	0.144312434	0.1000045	0.0153623	0.0070009	0.5	3
	2017	0.152637116	0.1000136	0.0105794	0.0102740	0.4	3
MTLA	2015	0.118576256	0.1008360	0.0146781	0.0050928	0.4	3
	2016	0.118271434	0.0167243	0.1750000	0.0039628	0.333333	3
	2017	0.066738766	0.0040834	0.3750000	0.0031412	0.4	3
NRCA	2015	0.000207347	0.0336033	0.3070992	0.6886639	0.5	5
	2016	0.000168321	0.0416553	0.3071220	0.6908718	0.5	5
	2017	0.000115559	0.0137632	0.3071220	0.6970145	0.5	5
OMRE	2015	0.027049386	0.0456441	0.8033724	0.0005616	0.333333	3
	2016	0.027952908	0.0066096	0.7317565	0.0005616	0.333333	3
	2017	0.033851401	0.0256216	0.7317565	0.0005616	0.4	3
PLIN	2015	0.036042235	0.0270554	0.0726566	0.0000128	0.25	3
	2016	0.046262276	0.0825315	0.0726566	0.0000128	0.25	3
	2017	0.079070579	0.0208535	0.3640916	0.0489657	0.25	3
PPRO	2015	0.02416235	0.1942634	0.1334637	0.0003722	0.5	3
	2016	0.029655167	0.0077351	0.2076280	0.0004543	0.5	3
	2017	0.017183067	0.1465821	0.0891578	0.0003723	0.5	3
PTPP	2015	0.052209845	0.0343269	0.5463703	0.0000010	0.333333	3
	2016	0.040035884	0.0324122	0.5110121	0.0000237	0.333333	3
	2017	0.047440901	0.0381689	0.5108365	0.0001255	0.333333	3
PUDP	2015	0.054113611	0.1200803	0.1509843	0.2691651	0.333333	3
	2016	0.098187887	0.1326230	0.1509843	0.2600936	0.333333	3
	2017	0.121018102	0.2115086	0.1509843	0.2600936	0.333333	3
PWON	2015	0.08527046	0.0172529	0.3542719	0.0001582	0.666667	3
	2016	0.093846554	0.0280011	0.3680351	0.0001582	0.5	3
	2017	0.085541856	0.0227180	0.2439494	0.0002230	0.333333	3
RDTX	2015	0.048376344	0.0008916	0.0767984	0.0102530	0.333333	2
	2016	0.006184119	0.0001160	0.0767984	0.0266187	0.333333	2
	2017	0.000964088	0.0007999	0.0767984	0.6024978	0.333333	2
RODA	2015	0.049890915	0.1072067	0.2287049	0.0000024	0.25	3
	2016	0.156365677	0.1730041	0.2220412	0.0000024	0.25	3
	2017	0.157972816	0.4064870	0.0363950	0.0006459	0.333333	3
SCBD	2015	0.051088956	0.0221943	0.0101018	0.4000001	0.4	3
	2016	0.044369694	0.1379538	0.0101018	0.4000001	0.4	3
	2017	0.036570261	0.1390121	0.0886603	0.4000001	0.25	3
SMRA	2015	0.086630512	0.0230145	0.0561456	0.0028233	0.5	3
	2016	0.091168896	0.0310487	0.0561456	0.0013863	0.5	3
	2017	0.08625744	0.0333577	0.0561456	0.0061035	0.5	3
TOTL	2015	0.000110705	0.0307383	0.6315636	0.1825011	0.333333	3

	2016	0.003844704	0.0202414	0.1403414	0.1825009	0.4	5
	2017	0.002268329	0.0117384	0.5097172	0.1825000	0.4	5
WIKI	2015	0.060915007	0.0359788	0.6504885	0.0122286	0.428571	3
	2016	0.047089391	0.0677335	0.6504885	0.0074054	0.333333	4
	2017	0.043667046	0.0726727	0.6504885	0.0074479	0.333333	5
WSKT	2015	0.033002667	0.0622143	0.6604312	0.0046686	0.333333	4
	2016	0.044022057	0.0158899	0.6603747	0.0032522	0.333333	4
	2017	0.049090257	0.0906959	0.6603626	0.0039095	0.333333	4

### LAMPIRAN 3

#### Output Hasil Pengujian Data di SPSS

#### Hasil Uji Statistik Deskriptif

##### Descriptive Statistics

	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	81	.0001160	.4064870	.068703911	.0763911832
KI	81	.0101018	.8033724	.237275519	.2205566559
KM	81	.0000002	.8317178	.118024713	.2282768352
DKI	81	.2000000	.6666667	.378439153	.0841755907
KA	81	2	5	3.09	.728
COD	81	.0001107	.2146339	.080452694	.0519833928
Valid n (listwise)	81				

#### Hasil Uji Normalitas

##### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
n		81
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.04061907
	Absolute	.072
Most Extreme Differences	Positive	.071
	Negative	-.072
Kolmogorov-Smirnov Z		.649
Asymp. Sig. (2-tailed)		.794

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

### Hasil Uji Multikolinearitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.136	.029		4.702	.000		
CETR	.245	.063	.360	3.899	.000	.953	1.050
KI	-.058	.023	-.248	-2.486	.015	.821	1.218
KM	-.052	.022	-.226	-2.330	.023	.864	1.158
DKI	-.014	.060	-.022	-.231	.818	.877	1.141
KA	-.015	.007	-.215	-2.130	.036	.801	1.248

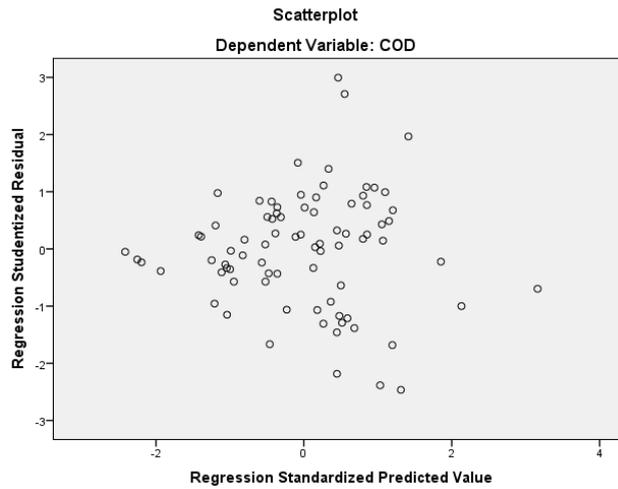
a. Dependent Variable: COD

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.053	.037		1.454	.150
CETR	.015	.079	.022	.192	.848
KI	-.021	.030	-.089	-.721	.473
KM	-.007	.028	-.031	-.253	.801
DKI	.067	.075	.107	.892	.375
KA	-.012	.009	-.169	-1.345	.183

a. Dependent Variable: ABS\_RES



### Hasil Uji Autokorelasi

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.624 <sup>a</sup>	.389	.349	.0419511976	1.148

a. Predictors: (Constant), KA, CETR, DKI, KM, KI

b. Dependent Variable: COD

### Hasil Uji Regresi Linier Berganda

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.136	.029		4.702	.000
	CETR	.245	.063	.360	3.899	.000
	KI	-.058	.023	-.248	-2.486	.015
	KM	-.052	.022	-.226	-2.330	.023
	DKI	-.014	.060	-.022	-.231	.818
	KA	-.015	.007	-.215	-2.130	.036

a. Dependent Variable: COD

### Hasil Uji Koefisien Determinasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.624 <sup>a</sup>	.389	.349	.0419511976

a. Predictors: (Constant), KA, CETR, DKI, KM, KI

b. Dependent Variable: COD

### Hasil Uji Parsial (Uji t)

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.136	.029		4.702	.000
	CETR	.245	.063	.360	3.899	.000
	KI	-.058	.023	-.248	-2.486	.015
	KM	-.052	.022	-.226	-2.330	.023
	DKI	-.014	.060	-.022	-.231	.818
	KA	-.015	.007	-.215	-2.130	.036

a. Dependent Variable: COD